



**Australian Government**

**Australian Centre for  
International Agricultural Research**

# Laporan Akhir

## Pilihan-Pilihan untuk Pengembangan Industri Kayu Jati di Sulawesi Tenggara, Indonesia

Laporan Penelitian SADI-ACIAR

---

nomor proyek SMAR/2007/229

---

tanggal publikasi Desember 2009

---

dipersiapkan oleh Mr Stephen Midgley  
Direktur, Salwood Asia-Pacific Pty Ltd

---



**Australia Indonesia Partnership**

**Kemitraan Australia Indonesia**



---

anggota tim penulis/  
kontributor/  
kolaborator

Dr Anto Rimbawanto  
Peneliti Utama  
Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan  
Ir. Mahfudz  
Peneliti  
Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan  
Ir. Anies Fuazi  
Peneliti  
Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan  
Mr Alan Brown

---

disetujui oleh

Dr Russell Haines  
Manajer Program Penelitian, Kehutanan  
Australian Centre for International Agricultural Research

---

Akhir laporan

FR2007-03a

---

ISBN

978 1 921615 70 2

---

diterbitkan oleh

ACIAR  
GPO Box 1571  
Canberra ACT 2601  
Australia

---

Publikasi ini diterbitkan oleh ACIAR ABN 34 864 955 427. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk memastikan keakuratan informasi yang termuat di dalam publikasi ini. Meskipun demikian, ACIAR tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan atau kelengkapan informasi atau pendapat yang termuat dalam publikasi ini. Anda dihimbau melakukan pemeriksaan sendiri sebelum mengambil keputusan yang terkait kepentingan Anda. Dilarang untuk melakukan reproduksi seluruh atau sebagian isi dari publikasi ini tanpa ijin tertulis dari ACIAR.

© Commonwealth of Australia 2009 – Laporan ini dilindungi oleh UU Hak Cipta. Selain dari pemanfaatan yang diijinkan oleh UU Hak Cipta 1968, tidak satupun bagian yang dibenarkan untuk direproduksi dengan cara apapun tanpa ijin tertulis sebelumnya dari pihak Commonwealth. Permintaan dan pertanyaan perihal reproduksi dan hak dialamatkan ke pihak Bagian Perlindungan Hak Cipta Commonwealth, Kejaksaan Agung, Robert Garran, National Circuit, Barton ACT 2600 atau ke <http://www.ag.gov.au/cca>.

## **Partisipasi ACIAR di dalam Program Kemitraan Australia–Indonesia**

Program Kemitraan Australia–Indonesia (Australia–Indonesia Partnership/AIP) mendukung berbagai upaya rekonstruksi dan pembangunan Indonesia, baik di daerah yang terkena bencana tsunami maupun di luarnya. Bantuan yang diberikan berupa kerja sama jangka panjang yang menekankan pada pembangunan sosial ekonomi.

Sebagai bagian dari AIP, Prakarsa Pengembangan Agribisnis Petani Kecil (Smallholder Agribusiness Development Inisiatif/SADI) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas petani dan agribisnis sebagai respon terhadap beragam peluang pasar. Program ini dilaksanakan di empat provinsi di kawasan timur Indonesia – Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Komitmen ACIAR pada SADI menekankan pada dukungan terhadap kegiatan penelitian terapan yang berbasis pasar, peningkatan proses alih pengetahuan dan pengembangan kapasitas para stakeholder kelembagaan utama. Komitmen ini bertujuan untuk mengatasi berbagai kendala dan hambatan yang merintangangi para petani kecil dan sektor agribisnis di dalam menjalin hubungan dengan pasar.





**Gambar sampul: Papan-papan kayu jati yang sementara dijemur di salah satu desa di Kabupaten Konawe Selatan. Papan-papan ini dipotong dari balok-balok kayu kasar dengan menggunakan gergaji mesin secara manual. Besarnya mata gergaji dan ketidakakuratan pemotongan mengakibatkan kerugian yang signifikan pada kayu yang bermutu tinggi ini. (Foto DSCN2186)**



Frontispiece: Wilayah penelitian. Lingkaran merah menandakan pusat-pusat kota yang dikunjungi; bintang merah menandakan lokasi kunjungan lapangan.

## Daftar Isi

1	Tujuan Penelitian .....	v
2	Ucapan Terima Kasih .....	vii
3	Daftar Singkatan .....	ix
4	Ringkasan .....	xii
5	Pendahuluan .....	1
	5.1 Kayu Jati di Indonesia .....	1
	5.2 Sulawesi Tenggara .....	2
6	Ketersediaan Plasma Nutfah Jati dan Kapasitas Pembibitan .....	13
7	Interaksi Masyarakat dan Peran <i>Tropical Forest Trust</i> .....	15
8	Perdagangan dan Pengolahan Jati di Provinsi Sulawesi Tenggara .....	18
9	Rantai Penawaran Kayu Jati dan Bisnis Perabot .....	20
	9.1 Perusahaan-perusahaan berbahan kayu jati .....	20
10	Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) .....	26
11	Kesenjangan pada Analisa Rantai Penawaran yang Ada Pada Saat Ini .....	29
12	Kesimpulan dan Rekomendasi .....	32
	12.1 Permintaan pasar .....	32
	12.2 Perilaku Masyarakat .....	32
	12.3 Isu-isu teknis .....	33
	12.4 Prospek Kontribusi ACIAR .....	33
	12.5 Rekomendasi Tentang Lembaga-lembaga Mitra di Sulawesi Tenggara/Indonesia yang Layak untuk Kegiatan Baru .....	35
13	Proyek-Proyek Lain yang Terkait dengan Kayu Jati .....	38
	13.1 Proyek-proyek non-ACIAR yang terkait dengan kayu jati .....	38
14	Daftar Pustaka .....	41
15	Lampiran 1 Penjualan kayu jati: dokumen dan biaya .....	43
16	Lampiran 2. Rincian biaya pengiriman kayu jati .....	46





---

# 1 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji berbagai prospek pasar untuk kayu jati di Sulawesi Tenggara dan potensi komersial untuk perluasan keterlibatan masyarakat di industri ini.
2. Mengidentifikasi berbagai hambatan sosial, ekonomi dan teknis di dalam mencapai keuntungan ekonomi maksimal dari industri kayu jati di Sulawesi Tenggara, antara lain:
  - Perilaku masyarakat
  - Hambatan-hambatan finansial dan investasi
  - Hambatan-hambatan teknis yang antara lain terkait dengan:
    - Pengelolaan silvikultur (*silvicultural*), termasuk pemanfaatan *mycorrhizae*.
    - Ketersediaan plasma nutfah unggulan, terutama dari klonal pilihan
    - Penerapan sistem tumpang sari, terutama dengan tanaman lada
    - Penintegrasian dengan penanaman tanaman pakan ternak
  - Hambatan-hambatan pengolahan dan manufaktur
3. Jika diperlukan, memberikan rekomendasi tentang berbagai kegiatan yang didukung oleh ACIAR, dengan fokus pada Sulawesi Tenggara, yang akan dihubungkan dengan sejumlah proyek terkait di Indonesia yang didukung oleh ACIAR dan pihak lainnya.
4. Mengidentifikasi lembaga-lembaga mitra yang sesuai di Sulawesi Tenggara untuk kegiatan baru yang direkomendasikan.



---

## 2 Ucapan Terima Kasih

Para penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berada di Indonesia dan Australia yang telah secara tulus mendedikasikan waktu dan berbagi informasi dengan tim studi ini:

- Di Kendari, Ir Suhendro Basori, Kepala Bagian Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memberikan komitmen professional terhadap pengelolaan perkebunan jati berbasis masyarakat yang efektif dan atas segala dukungan dan kerjasama yang diberikan.
- Di Kabupaten Konawe Selatan (Kabupaten Konawe Selatan), Ketua Koperasi Kehutanan (Koperasi Hutan Jaya Lestari: KHJL) Bapak Abdul Haris T dan para anggota koperasi yang telah mendedikasikan waktu dan berbagi informasi.
- Di Kabupaten Muna, Ir Takari, seorang petani kayu jati dan staf Dinas Kehutanan.
- Di Kabupaten Buton, Syarifudin, manajer fasilitas pembibitan Dinas Kehutanan atas waktu yang didedikasikan untuk membantu kegiatan penelitian ini.
- Tim dari *Tropical Forest Trust* di Semarang dan Kendari yang telah memberikan dukungan, waktu dan informasi. Komitmen mereka yang tulus kepada masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan dan kegiatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sangatlah berharga.
- Bapak Dedi Rohadi dari CIFOR dan Dr Michael Blyth, Peneliti Mitra, Australian National University, atas waktu dan informasi yang diberikan tentang berbagai proyek yang terkait dengan pengembangan kayu jati yang dilaksanakan oleh para ilmuwan CIFOR (dan ICRAF) dengan dukungan ACIAR.
- Dr Eko Hardiyanto dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, atas bantuan akses informasi dan literatur yang diberikan.
- Ir Wakhid Nurdin, Wakil Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kayu Jati Perhutani di Cepu dan Ir Sudarsono atas waktu yang telah didedikasikan.
- Bapak Anis Eko Hartanto, Sekretaris Eksekutif Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) di Jepara atas berbagai masukan tentang tantangan yang dihadapi oleh industri pengolahan perabot berbahan kayu jati.
- Dr Lesley Potter, Peneliti Tamu di *Research School of Pacific and Asian Studies* Australian National University atas berbagai masukan dan tips praktis yang sangat berharga.



---

### 3 Daftar Singkatan

ASMINDO	Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia
CBO	Community-based organisation; lembaga tingkat desa
CIFOR	Center for International Forestry Research
CSO	Clonal seed orchard
FOB	Free on board
FORDA	Forestry Research and Development Agency
FSC	Forest Stewardship Council
GIS	Geographic information system
ha	Hektar
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
ICRAF	International Centre for Research in Agroforestry (World Agroforestry Centre)
IFC	International Finance Corporation
JAUH	Jaringan Untuk Hutan
KHJL	Koperasi Hutan Jaya Lestari (koperasi tingkat kabupaten)
Kabupaten Konawe Selatan	Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
M	Million
m	Meter
mai	Mean annual increment
NGO	Non-government organisation
pa	Per annum
PENSA	Program for Eastern Indonesia SME Assistance
PP	Perum Perhutani (badan usaha milik negara)
RECOFTC	Regional Community Forestry Training Centre

sed	Small-end diameter
SKSHH	Surat Keterangan Sah Hasil Hutan
SPA	Seed production area
SSO	Seedling seed orchard
TFT	Tropical Forest Trust
WTO	World Trade Organization

## **Nilai Tukar Mata Uang (Mei–Juli 2007)**

(ex Forex)

US\$1,00 = Aus\$1,19

US\$1,00 = Rp8.964

Aus\$1,00 = Rp7.574



---

## 4 Ringkasan

Indonesia merupakan salah satu kawasan pembudidaya pohon jati (*Tectona grandis*) terbesar di dunia, dimana diperkirakan terdapat sekitar 1,7 juta ha perkebunan jati yang bernilai 31% dari seluruh potensi perkebunan jati yang ada di dunia, yaitu 5,7 juta ha. Potensi sumberdaya jati nasional ini mendukung terwujudnya ekspor industri berbahan baku jati senilai 1,8 juta Dolar AS setiap tahunnya. Sekitar 3,1 juta rumah tangga terlibat di dalam kegiatan budidaya jati melalui sistem budidaya pertanian berbasis kehutanan.

Pohon jati memiliki sejarah panjang sebagai jenis tanaman perkebunan yang eksotik di Indonesia, dimana diyakini bahwa tanaman ini telah mulai dibudidayakan sejak sekitar 800 tahun yang lalu. Selama lebih dari 400 tahun, pohon jati dibudidayakan dengan sistem tumpang sari di Sulawesi Tenggara dimana hal ini merupakan bagian yang lazim di dalam sistem pertanian lokal.

Pohon jati memiliki nilai penting di Sulawesi Tenggara dan 'kayu jati Muna' (dari Pulau Muna) memiliki kredibilitas pasar yang sangat baik. Berkembangnya pelibatan masyarakat di dalam pengelolaan hutan, seiring dengan keberadaan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang hal tersebut telah mendorong perluasan area budidaya pohon jati di Sulawesi Tenggara. Salah satu pihak yang mendukung kegiatan perluasan ini di Kabupaten Konawe Selatan adalah lembaga *Tropical Forest Trust*, yang bertujuan untuk menghubungkan para pengecer perabot berbahan kayu jati di pasar Eropa dan Amerika dengan para pembudidaya pohon jati yang memiliki sertifikat FSC. TFT telah berhasil mendukung sebuah koperasi kehutanan untuk memperoleh sertifikasi FSC untuk sumberdaya pohon jati yang dimilikinya.

Terbatasnya perluasan pengolahan kayu jati sekunder di Sulawesi Tenggara cenderung diakibatkan oleh kurangnya keahlian, terbatasnya prasarana berorientasi ekspor dan kecilnya skala sumber daya yang tersedia. Akan tetapi perluasan sumber daya jati di Sulawesi Tenggara akan sangat penting untuk mendukung keberadaan fasilitas pengolahan yang terdapat di Pulau Jawa. Terdapat peluang untuk meningkatkan kegiatan pengolahan kayu di Sulawesi Tenggara dan untuk melakukan ekspor kayu olahan yang telah diproses secara lebih lanjut daripada hanya sekedar mengirim balok kayu secara gelondongan.

Bagi ACIAR terdapat sebuah alasan yang kuat untuk terlibat di dalam upaya perluasan sumber daya jati di Sulawesi. Pohon jati tumbuh dengan baik di kawasan timur Indonesia dan hanya mengalami sedikit hambatan teknis; tanaman ini sesuai dengan tradisi lokal yang telah ada sejak lama serta dengan kondisi dan industri setempat maupun pola penggunaan lahan; masyarakat dapat berperan serta karena hampir sebagian besar masyarakat desa memiliki akses ke tanah; industri kayu jati telah cukup mapan dan memiliki prospek masa depan yang cerah; selain itu budidaya kayu jati memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat maupun pemerintah daerah.

ACIAR berada pada posisi untuk menawarkan bantuan kepada para petani kecil yang membudidayakan kayu jati di Sulawesi Tenggara. Bantuan dimaksud adalah melalui pemberian dukungan kepada sejumlah kegiatan kehutanan berbasis masyarakat yang tengah berlangsung di provinsi ini. Selain itu juga berupa bantuan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan pembudidayaan pohon jati terhubung dengan pasar. Serangkaian peluang yang sesuai telah diidentifikasi termasuk studi sosial ekonomi dan dukungan di dalam pembuatan sistem pencatatan persediaan yang terpercaya, di dalam peningkatan berbagai pilihan pembudidayaan dan pilihan sistem tumpang sari, di dalam peningkatan kegiatan pengolahan primer dan penggunaan sisa potongan kayu dan mendemonstrasikan penanaman berbagai spesies tanaman alternatif.



Sejumlah mitra potensial telah diidentifikasi untuk kegiatan-kegiatan yang didukung oleh ACIAR, di antaranya adalah Universitas Haluoleo (Unhalu); *Tropical Forest Trust*; Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, *Forestry Research and Development Agency* (FORDA), Yogyakarta; Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara; *Center for International Forest Research* (CIFOR); *World Agroforestry Centre* (ICRAF); SENADA: Indonesia Competitiveness Program; dan Universitas Gadjah Mada.



---

## 5 Pendahuluan

---

### 5.1 Kayu Jati di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu kawasan pembudidaya pohon jati (*Tectona grandis*) terbesar di dunia, dimana diperkirakan terdapat sekitar 1,7 juta ha perkebunan jati yang bernilai 31% dari seluruh potensi perkebunan jati yang ada di dunia, yaitu 5,7 juta ha (Bhat dan Ma 2004). Pohon jati memiliki sejarah panjang sebagai jenis tanaman perkebunan yang eksotik di Indonesia, dimana diyakini bahwa tanaman ini telah mulai dibudidayakan sejak sekitar 800 tahun yang lalu. Sebagian besar perkebunan jati berada di Pulau Jawa, dimana pihak pembudidaya terbesar adalah Perum Perhutani (sebuah perusahaan kehutanan milik negara) yang mengelola sekitar 1 juta ha hutan perkebunan yang memiliki kawasan hutan jati seluas 600.000 ha (ITTO 2006). Selain perkebunan yang dikelola oleh Perum Perhutani, terdapat sejumlah perkebunan yang dikelola oleh masyarakat maupun swasta — Nawir dan Manalu (2006) memperkirakan bahwa terdapat sekitar 1,2 juta ha lahan perkebunan berbasis hutan di Indonesia, yang utamanya dimanfaatkan untuk membudidayakan pohon jati. Di luar wilayah Pulau Jawa, pohon jati umumnya dibudidayakan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur, dimana diperkirakan terdapat lahan perkebunan resmi seluas 60.000 ha dan sejumlah lahan perkebunan dengan luas signifikan yang dikelola oleh petani rakyat. Pohon jati merupakan spesies pohon yang sangat populer bagi para petani rakyat, sebagaimana yang dikonfirmasi oleh survei terkini Badan Pusat Statistik (ITTO 2006).

Perkebunan jati komersial sangat bergantung pada partisipasi masyarakat pada awal pengembangannya. Pohon jati umumnya ditumpangsarikan dengan berbagai jenis tanaman perkebunan, misalnya tanaman jagung pada sistem yang umum dikenal dengan sebutan '*taungya*'; hal ini merupakan dasar bagi pendesainan sistem hutan kemasyarakatan yang diperkenalkan oleh Departemen Kehutanan melalui Perum Perhutani di Pulau Jawa pada tahun 1980-an (Hindra 2005).

Produksi kayu jati dan pembuatan perabot merupakan industri utama di Pulau Jawa, dimana penjualan kayu batangan dan gelondongan mencapai angka 600.000 m<sup>3</sup> per tahun, yang diperoleh dari lahan seluas 8000–10.000 ha (Suhaendi 1998). Kebutuhan pasokan kayu jati untuk industri perabot dan lantai papan di Pulau Jawa adalah sebesar 8,2 juta m<sup>3</sup> per tahunnya, sementara pasokan yang tersedia hanya sebesar 2,7 juta m<sup>3</sup> — hanya sebesar 33% dari kebutuhan yang ada (ITTO 2006). Produksi dari perkebunan hutan telah menjadi salah satu bagian penting dari pasokan kayu jati, dan diperkirakan terdapat sekitar 23,8 juta m<sup>3</sup> yang dapat dipanen dari sistem ini (Nawir dan Manalu 2006).

Perkebunan jati yang dikelola masyarakat umumnya memiliki masa rotasi yang jauh lebih singkat (<20 tahun) dibandingkan dengan yang dibudidayakan secara komersial oleh perkebunan pemerintah, dan mereka mengalami keterbatasan input pengelolaan tanaman yang ideal, misalnya pemangkasan batang maupun daun. Merupakan suatu hal yang tidak lazim untuk membudidayakan varietas plasma nutfah yang telah disempurnakan secara genetik di dalam kegiatan budidaya berbasis masyarakat. Pohon-pohon berusia muda dari perkebunan masyarakat secara nyata berbeda dengan pohon-pohon yang berasal dari perkebunan dengan masa rotasi yang panjang; pohon-pohon tersebut cenderung memiliki ukuran yang pendek, berdiameter kecil dan memiliki harga jual yang lebih rendah.

## 5.2 Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara mencakup bagian selatan dan tenggara dari Pulau Sulawesi dan sejumlah pulau yang ada di sekitar Pulau Sulawesi. Provinsi ini memiliki wilayah seluas 38.140 km<sup>2</sup>, dan secara administratif terdiri dari empat kabupaten, satu kota dan satu kota administratif, 64 kecamatan, 165 kelurahan dan 644 desa (Tabel 1, Anon. 1999). Pada tahun 2000, provinsi ini memiliki populasi penduduk sebesar 1,8 juta jiwa (Tabel 2, Anon. 1999).

Potter dan Lee (1998) menyatakan bahwa:

Berdasarkan standard Indonesia, provinsi ini merupakan provinsi yang berukuran kecil serta terbelakang dan berusaha untuk menarik perhatian dari pihak luar. Secara historis, kedua pulau yang berada di pantai selatan daratan utama, yaitu Muna dan Buton, merupakan pusat dari penduduk dan kegiatannya. Kesultanan Wolio (atau Buton) terletak di Bau Bau di Pulau Buton, sebuah titik pemberhentian penting untuk kapal-kapal yang berlayar menuju dan dari Kepulauan Maluku yang merupakan penghasil rempah-rempah. sementara itu wilayah daratan utama memiliki populasi yang sangat rendah, dihuni oleh masyarakat Tolaki di pantai timur dan Mekongga di bagian barat di sekitar Kolaka. Suku-suku terasing bermukim di bagian pegunungan di sebelah utara.

Setelah Sulawesi Tenggara dinyatakan sebagai sebuah provinsi yang independen pada tahun 1964, maka ibukota provinsi didirikan di Kendari, yang menjadi awal peralihan kegiatan ekonomi dan kekuasaan politik ke wilayah daratan utama. Walaupun Muna dan Buton tetap memiliki tingkat kepadatan yang tertinggi di provinsi ini, pada saat ini Kendari telah menjadi wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar, dimana Kendari dan Kolaka mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, yaitu sekitar 4 hingga 5% per tahunnya. Sebagian besar pertumbuhan ini disebabkan oleh adanya program transmigrasi dari Pulau Jawa dan Bali. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sebanyak 59.000 transmigran formal telah direlokasikan ke Sulawesi Tenggara. Terdapat juga sejumlah besar populasi suku Bugis dan Bajau yang bermukim di sekitar wilayah pantai. Provinsi ini memiliki tingkat kepadatan sebesar 38 jiwa per kilometer bujursangkar.

Perekonomian Sulawesi Tenggara cenderung masih kecil. Sektor pemerintah cenderung dominan, sementara sektor industri relatif masih kecil dan diikuti oleh sektor perdagangan yang tidak terlalu signifikan. Alokasi dana dari pemerintah pusat mendominasi persentase belanja daerah. Komoditas nikel dan perikanan mencakup 99% dari nilai ekspor internasional ... Sebagian besar masyarakat memperoleh penghasilan dari kegiatan pertanian berskala kecil dan tradisional. Mereka melakukan kegiatan pertanian padi di lahan kering, membudidayakan jagung dan ubi kayu, serta memperoleh penghasilan dari produk-produk kehutanan maupun perikanan dan budidaya perkebunan serta peternakan (sapi dan ayam). Hasil dari tanaman pangan maupun perkebunan cenderung rendah karena kondisi tanah yang tidak subur, penggunaan input pertanian yang terbatas dan pemeliharaan yang terbatas. Para petani cenderung menyimpan hasil tanaman pangan mereka untuk konsumsi rumah tangga dan menjual hasil dari tanaman perkebunan dan hutan sebagai sumber penghasilan. Hasil tanaman diperdagangkan secara antar pulau. Tujuh puluh delapan persen kegiatan perdagangan antar pulau dari Sulawesi Tenggara berasal dari hasil tanaman perkebunan, yang sebagian besar dibudidayakan oleh petani kecil. Komoditas tersebut mencakup jambu mete, kopra, kapas, kapok dan kakao. Sekitar 10% berasal dari produk hutan, utamanya kayu gergajian dan rotan.

**Tabel 1. Struktur administratif Provinsi Sulawesi Tenggara**

No.	Kabupaten	Ibukota	Jumlah		
			Kecamatan	Kelurahan	Desa
1.	Kendari	Unaaha	18	22	290
2.	Kolaka	Kolaka	10	27	99
3.	Buton	Bau-Bau	19	37	160

4.	Muna	Raha	12	30	95
5.	Kota Kendari	Kendari	3	26	-
6.	Kota administratif Bau-Bau	Bau-Bau	2	23	-
	Total		64	165	644

**Tabel 2. Populasi ('000) Provinsi Sulawesi Tenggara, 1990–2000**

Kabupaten	1990	1996	1997	1998	1999	2000
Kendari	192,1	630,0	655,0	680,4	706,8	733,8
Kolaka	241,6	317,4	332,3	345,7	360,5	375,9
Buton	395,7	437,2	443,4	449,5	455,4	461,4
Muna	227,9	258,8	263,7	268,6	273,4	278,2
Total	1357,3	1643,4	1693,4	1744,2	1796,1	1849,3



**Gambar 1. (a) Kegiatan ekonomi di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Sulawesi sangat dibatasi oleh permasalahan biaya dan kesulitan komunikasi dan transportasi (2161); (b) Pohon jati berusia tua, Cagar Alam Napabalano, Muna; pada usia 350 tahun, pohon ini kemungkinan merupakan salah satu pohon jati tertua yang ada di dunia (2065); (c) kantor dinas kehutanan yang dibangun dengan bahan baku kayu jati pada tahun 1910 di Raha, ibukota Kabupaten Muna dan merupakan ibukota awal dari Provinsi Sulawesi Tenggara (2098)**

Topografi Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh wilayah pegunungan yang mencakup sekitar 60% luasan wilayah provinsi ini dengan tingkat kemiringan  $>15^\circ$  (Gambar 1). Kondisi geologi sebagian besar terdiri dari lapisan sedimen ( $>67\%$ ) dan lapisan tanah didominasi oleh jenis tanah merah-kuning ( $>60\%$ ) (Anon. 1999).

Iklim provinsi ini terdiri dari musim hujan dan kemarau. Temperatur tertinggi di provinsi ini adalah  $31^\circ\text{C}$ , dan terendah sebesar  $19^\circ\text{C}$ , dimana suhu rata-rata adalah  $25\text{--}27^\circ\text{C}$ . Curah hujan di Provinsi Sulawesi Tenggara bervariasi dan membagi provinsi ini ke dalam dua wilayah: wilayah basah dengan tingkat curah hujan sebesar  $>2000\text{ mm}$  per tahun (Kendari–Kolaka, dan bagian utara Pulau Buton dan Wakatobi) dan wilayah semi kering, dengan



tingkat curah hujan <2000 mm per tahun dan dicirikan oleh musim kemarau yang panjang (Kendari dan Kolaka serta bagian selatan dari Provinsi Sulawesi Tenggara). Terdapat jumlah hari hujan rata-rata sebesar 109 hari per tahun.

Curah hujan yang rendah dan tidak dapat diprediksi, jumlah populasi penduduk yang kecil dan kurangnya luasan dataran yang rata cenderung menjadi penghalang pengembangan kawasan pertanian berskala besar di provinsi ini.

### 5.2.1 Pohon Jati di Provinsi Sulawesi Tenggara

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama di Pulau Muna, perkebunan jati merupakan bagian utama dari kawasan pedesaan dan telah tercipta selama lebih dari 400 tahun. Potter dan Lee (1998) menjelaskan sejarah dari pengenalan budidaya jati di Muna:

Pihak kolonial Belanda berspekulasi bahwa tanaman ini merupakan tanaman alami, sementara sumber lain mengatakan bahwa tanaman ini dibawa dari Pulau Jawa oleh para pedagang dari Maluku. Secara umum diyakini bahwa Raja Islam pertama di Tiworo, bagian barat daya Muna menerima bibit pohon jati dari Sultan Demak, yang berlokasi di bagian tengah dari Pulau Jawa ketika dia melakukan kunjungan ke kesultanan tersebut pada abad keenambelas. Ketika kembali ke Muna dia memerintahkan kepada para petani untuk menanam ulang lahan mereka dengan pohon jati setelah digunakan untuk bercocok tanam, dimana hal ini kemudian bermuara pada tersebarnya kegiatan penanaman pohon jati di Muna. Entah kisah ini benar atau tidak, kepopuleran kisah ini menyiratkan pentingnya hutan jati Muna terhadap masyarakat Sulawesi Tenggara. Jati Muna merupakan monument hidup tentang hubungan historis wilayah ini dengan pusat penyebaran agama Islam (Demak) dan pusat kekuasaan (Pulau Jawa) di Indonesia pada waktu itu. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat yang sangat religius yang hidup di provinsi yang terbelakang dan tertinggal yang menyadari pentingnya untuk mengembangkan wilayah dan identitas mereka di era modern ini. Seabad sebelumnya, Sultan Buton masih melarang masyarakat biasa untuk menebang pohon jati dan hanya memanfaatkannya untuk keperluan kerajaan saja.

Sumberdaya kayu jati di Pulau Muna diperkirakan mencapai sekitar 60.000 ha, dimana seluas 10.000 terletak di lahan milik pribadi. Pada tahun 1969, pemerintah daerah melakukan perluasan dan pengelolaan perkebunan jati dengan sumber anggaran dari pemerintah pusat. Program rehabilitasi hutan ini berlangsung hingga 1982, terutama di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, dimana sekitar 32.000 ha perkebunan jati dibentuk. Pada tahun 1982 dan 1999, proyek ini diberi nama baru dan dikelola di bawah Program Pengembangan Perkebunan Kayu.

Selama periode reformasi Indonesia 1997–1998 terjadi ketidakjelasan tentang tingkatan pemerintah yang memiliki tanggungjawab pengelolaan sumber daya jati di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kantor dinas kehutanan tingkat provinsi tidak mampu menentukan sikap yang jelas dan pada saat itu pemerintah tidak memiliki kendali yang kuat. Hal ini kemudian berakibat pada maraknya kegiatan penebangan liar di hutan-hutan jati yang ada di Muna dan Kabupaten Konawe Selatan. Sumber daya jati di Muna berkurang hingga 21.000 ha. Sekitar tahun 1999–2000, perkebunan Jati di Kabupaten Konawe Selatan yang telah dibudidayakan sejak tahun 1970-an telah mencapai umur dewasa dan hal ini mengundang para penebang liar, yang berakibat berkurangnya wilayah hutan hingga 8.000 ha.

Pada tahun 1980-an sejumlah perkebunan besar dicitakan sebagai bagian dari proyek rehabilitasi yang didanai oleh pemerintah, dan kawasan-kawasan perkebunan tersebut pada saat ini sedang dalam proses peralihan ke pengelolaan oleh masyarakat melalui Program Hutan Tanaman Rakyat yang dilaksanakan oleh pihak Departemen Kehutanan. Diperkirakan bahwa sebanyak 30.000 rumah tangga terlibat di dalam kegiatan budidaya jati di Provinsi Sulawesi Tenggara (Nawir dan Manalu 2006).

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan hutan milik negara melalui sistem bagi hasil. Bagi perkebunan yang dikelola oleh masyarakat (atau swasta) di lahan milik negara, maka pemerintah akan melibatkan pihak perbankan komersial untuk memberikan pinjaman dana investasi (pada saat ini sebesar Rp. 7 juta per ha atau ~Aus\$11.00,00). Pinjaman ini akan diperlakukan sebagai pinjaman non komersial kepada para petani yang akan dibayar setelah dilakukan panen 15–20 tahun kemudian. Satu-satunya pajak (keuntungan) yang ditarik oleh pemerintah adalah pajak kayu sebesar 10% (dipungut sebesar 10% untuk jenis kayu tertentu - lebih rendah daripada yang berlaku di pasar).





**Gambar 2. (a) Biji pohon jati, Perum Perhutani, Cepu, Pulau Jawa, lahan pembibitan eks klonal: pada tahun 2006, Perum Perhutani mengumpulkan 41 ton biji pohon jati (2260); (b) dan (c) Bibit dan plasma jati di di Fasilitas Pembibitan Pelangang,**

Mengingat keberagaman stakeholder di dalam hutan kemasyarakatan, maka semua pihak menyepakati untuk membentuk sebuah Komisi Provinsi tentang Hutan Kemasyarakatan yang diketuai oleh Kepala Dinas Kehutanan. Pembentukan ini membutuhkan waktu selama dua tahun dan mencakup hampir seluruh stakeholder maupun sektor yang terlibat — pertanian, peternakan, hortikultura. Sebuah jaringan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lokal, JAUH (Jaringan Untuk Hutan) dibentuk dan dibantu untuk mendirikan sebuah koperasi tingkat kabupaten, KHJL (Koperasi Hutan Jaya Lestari) yang merupakan pihak utama di dalam kerjasama dengan *Tropical Forest Trust* di Kabupaten Konawe Selatan). JAUH membantu pelaksanaan pelatihan manajemen bagi koperasi KHJL.

Hanya sekitar 30% perkebunan yang dibentuk di Kabupaten Konawe Selatan sebelum 2002 yang masih bertahan hingga saat ini — yaitu sekitar, ~8000 ha dari sebelumnya 24.538 ha — akibat penebangan liar dan pengelolaan yang salah.

Di bawah kesepakatan hutan kemasyarakatan yang baru dengan pihak koperasi di Kabupaten Konawe Selatan, kantor dinas kehutanan tingkat provinsi memberikan bantuan khusus, misalnya permasalahan jalanan dan perlindungan — isu-isu yang membutuhkan dukungan prasarana maupun kapasitas teknis. Walaupun pihak koperasi merupakan pihak yang akan bertanggungjawab, namun dinas kehutanan akan berperan serta dalam hal dukungan perencanaan manajemen tahunan, perencanaan pemanenan, inventarisasi, dan lain sebagainya. Pohon jati yang berusia lima belas tahun merupakan standar untuk penggunaan oleh masyarakat di masa depan.

Terdapat pembatasan atas spesies yang dapat ditanam di bawah kegiatan hutan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemerintah — pohon jati merupakan jenis yang disukai (Gambar 2) namun terdapat juga sejumlah pilihan lain, termasuk pohon buah-buahan, eukaliptus dan spesies lain seperti jarak pagar (*Jatropha curcas*, tanaman penghasil biji berminyak yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku *bio-diesel*).

Proses perijinan oleh pemerintah tetap berlaku untuk perkebunan yang dikelola oleh masyarakat. Masyarakat diharuskan untuk meminta ijin kepada kantor dinas kehutanan kabupaten apabila mereka ingin menebang pohon mereka. Pihak dinas kemudian akan melakukan pemeriksaan inventaris sebelum mengeluarkan ijin yang menyebutkan dengan rinci perihal rencana penebangan yang akan dilakukan. Setelah melakukan penebangan, maka sebuah laporan harus dipersiapkan tentang spesies dan volume penebangan yang kemudian diajukan ke kantor dinas kehutanan tingkat kabupaten. Laporan ini akan dikaji berdasarkan hasil temuan

**Kabupaten Konawe Selatan  
(2181, 2177)**

lapangan dinas kehutanan dan dokumen ijin yang diberikan sebelum kemudian mengizinkan kayu tersebut dijual secara bebas. Lampiran 1 memperlihatkan proses administratif penebangan pohon dan pemindahan kayu hasil tebangan dari hutan ke lokasi pengolahan. Lampiran 2 memperlihatkan rincian biaya yang muncul di dalam proses rantai nilai dari hutan hingga ke pabrik.

Daya tarik perkebunan jati di dalam penggunaan lahan dipahami secara jelas oleh berbagai rumah tangga petani yang menanam dan membudidayakan jati di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejumlah alasan yang dikemukakan oleh masyarakat tentang daya tarik jati adalah:

- mudah ditanam dan dibudidayakan
- mudah dikelola
- mudah dikelola walau pemiliknya tidak di tempat (bekerja di kota, dibiarkan tumbuh secara alami oleh pemilik lahan, buruh migran, bekerja di pulau lainnya, dan lain sebagainya.)
- hanya membutuhkan sedikit input setelah ditanam
- pasar yang stabil
- harga yang menarik — meningkat secara bertahap seiring waktu, sementara harga komoditas lainnya (kakao dan jambu mete) tetap konstan
- dapat dipanen sesuai dengan keinginan pemiliknya
- berfungsi seperti tabungan

Alasan masyarakat di daerah ini untuk membudidayakan jati sama dengan alasan yang dikemukakan oleh petani di Laos bagian utara (Midgley et al. 2007).

Daya tarik keuangan juga diindikasikan oleh sebuah studi yang dilaksanakan oleh IFC/PENSA (*Triple Line Consulting* 2005) yang melakukan pengkajian atas arus kas perkebunan jati di Pulau Jawa (Tabel 3).

**Tabel 3. Arus kas (Rp × 1000) 1 ha perkebunan jati untuk masa waktu 20 tahun**

Tahun	Item biaya						Biaya total	Pendapatan	Arus kas bersih
	Pembibitan	Penanaman	Pupuk	Pemangkasan	Penyiangan	Sewa tanah			
1	11 100	3 000				500	14 600		-14 600
2			1 332	83	600	500	2 515		-2 515
3			1 332	83	600	500	2 515		-2 515
4			1 332	83	600	500	2 515		-2 515
5			1 332	83	600	500	2 515		-2 515
6						500	500		-500
7						500	500		-500
8						500	500		-500
9						500	500		-500
10						500	500		-500
11						500	500		-500
12						500	500	4 140	3 640
13						500	500		-500
14						500	500		-500
15						500	500	2 550	2 050
16						500	500		-500
17						500	500		-500
18						500	500		-500
19						500	500		-500
20						500	500	288 000	287 500
Total	11 100	3 000	5 328	333	2400	10 000	32 161	294 690	262 529

Studi tersebut menyimpulkan bahwa:



... arus kas ini memperlihatkan sebuah *Net Present Value* (NPV), dengan biaya modal 12%, dari investasi sebesar Rp.10,7 juta (US\$1120) per hektar kebun. Tingkat *internal rate of return* (IRR) adalah sebesar 14%. Arus kas ini mencakup biaya sewa lahan kepada petani. Arus kas ini mengabaikan peningkatan harga jual dan inflasi yang di atas rata-rata. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, harga kayu jati telah secara konsisten mengalami peningkatan pada besaran lebih tinggi daripada tingkat inflasi sehingga tingkat keuntungan yang diperoleh jelas lebih tinggi daripada angka yang diindikasikan. Apabila sewa tanah dihilangkan, maka NPV akan meningkat menjadi Rp14,9 juta dan IRR menjadi 16%. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan ini sangat menguntungkan dan berharga sebagai pilihan investasi.



Di Kabupaten Konawe Selatan, alasan antusiasme masyarakat untuk membudidayakan jati (Gambar 3) didasarkan pada harapan bahwa apabila masyarakat memiliki — satu ha lahan budidaya jati dengan jarak tanam 4 m × 4 m), maka pada usia 15 tahun diyakini akan memiliki harga penjualan di tingkat petani sebesar Rp1,3 miliar. Batang kayu dipotong menjadi balok dengan menggunakan gergaji mesin. Angka ini menunjukkan 'mai' di atas 20 m<sup>3</sup>/ha. Hal ini perlu dikonfirmasi untuk menghindari tingginya pengharapan yang kemudian tidak terpenuhi. Angka 'mai' yang logis untuk perkebunan jati yang dikelola oleh masyarakat adalah sebesar 13–14 m<sup>3</sup>/ha.



Sebagai catatan para petani jati cenderung menolak untuk melakukan pemangkasan/pengurangan jumlah pohon — karena mereka meyakini bahwa setiap pohon memiliki nilai ekonomi dan menolak untuk menebang pohon (untuk alasan apapun) kecuali untuk dijual.

**Gambar 3. (a) Pohon jati merupakan bagian utama dari kehidupan petani di Sulawesi: pemandangan Raha bagian utara, Pulau Muna (2072); (b) Tanaman jati yang ditumpangsarikan dengan jagung, ditanam pada tahun 2005; Pasar Sore, Pulau Jawa (2305); (c) Sistem hutan kemasyarakatan tradisional, Kabupaten Konawe Selatan: *Gliricidia***

*sepium* sebagai penutup di antara rotasi tanaman. Tanaman penutup bersaing dengan gulma di antara jarak rotasi tanaman, mengurangi beban kerja yang dibutuhkan untuk mempersiapkan lahan bagi tanaman berikutnya, dimana dalam hal ini mencakup jati (2200)



**Gambar 4. (a) Perkebunan jati Perhutani, Passar Sore, Pulau Jawa, ditanam tahun 1956 (2292); (b) kulit pohon jati dewasa dikupas secara**

Hal ini merupakan tantangan bagi kegiatan penelitian *silvicultural* dan membutuhkan penggunaan penebangan pohon jati di dalam kegiatan demonstrasi *silviculture*. Hasil temuan ini mirip dengan hasil temuan di Laos bagian utara (Midgley, dkk. 2007).

Batangan kayu jati dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, dengan panjang minimum 1,1 m length — A1, A2, A3:

- A1: <20 cm sed
- A2: 22–28 cm sed
- A3: >30 cm sed.

Para petani memotong batang kayu dengan prioritas utama pada batang kayu jenis A3. Harga kayu jati bervariasi di setiap lokasi, dari pembelian di tingkat petani hingga pembelian di tempat pengumpulan, dan apakah batang kayu tersebut telah dipotong menjadi balok dan memiliki kerusakan.

Harga yang diterima oleh petani di Muna adalah:

- A1: <20 cm sed dan dijual seharga Rp1,2 juta /m<sup>3</sup>
- A2: 22–28 cm sed dan dijual seharga Rp1,8 juta /m<sup>3</sup>
- A3: >30 cm sed dan dijual seharga Rp2,2 juta/m<sup>3</sup>.

Pada saat ini pasar premium untuk kayu jati yang memiliki sertifikat sedang berkembang. Para anggota Tropical Forest Trust pada saat ini tengah mengusahakan agar kayu jati dari Kabupaten Konawe Selatan dapat menembus pasar Eropa dan bersedia untuk membayar biaya sertifikasi kayu jati yang mereka hasilkan. Untuk kayu yang memiliki sertifikat dari koperasi yang



**melingkar dua tahun sebelum ditebang untuk mengurangi beban cabang dan kayu, mengurangi risiko kerusakan pada saat ditebang (2282)**

**(c) Lapangan tempat penyimpanan balok kayu, Perum Perhutani, Passar Sore (2298)**

didukung oleh TFT di Kabupaten Konawe Selatan, maka harga yang ditawarkan untuk kayu berbentuk balok adalah:

- harga balok kayu bersertifikat adalah: Rp. 1,5 juta/m<sup>3</sup> di tingkat petani dan Rp. 5.3 juta/m<sup>3</sup> FOB
- harga balok kayu yang tidak bersertifikat adalah: Rp. 0,5–0,7 juta/m<sup>3</sup> di tingkat petani dan Rp. 1,5 juta/m<sup>3</sup> FOB.

Permasalahan perdagangan kayu yang tidak bersertifikat adalah karena kayu yang dijual juga mencakup kayu-kayu yang ditebang secara ilegal di hutan-hutan milik pemerintah.

---

## 6 Ketersediaan Plasma Nutfah Jati dan Kapasitas Pembibitan

Dinas kehutanan di setiap tingkatan menyadari perlunya menawarkan kepada para petani plasma nutfah yang bermutu tinggi. Di Sulawesi Tenggara, terdapat kawasan budidaya bibit seluas 50 ha yang berlokasi di Buton dan 37 ha di Muna. Dilaporkan juga bahwa sebuah kawasan budidaya bibit sedang dikembangkan di Kabupaten Konawe Selatan, namun pada saat ini belum aktif menghasilkan bibit.

Perhutani, beroperasi di Pulau Jawa, memiliki lahan pembibitan klonal seluas 1300 ha dengan umur induk yang bervariasi dari 23 hingga 11 years dan mampu menghasilkan 20 ton benih/biji setiap tahunnya. Contoh gelondongan dari biji tersebut tersedia dengan harga Rp. 850.000 /kg ( $\approx$ US\$100). Produktifitas yang rendah merupakan hasil dari beragamnya waktu pembuahan yang dialami oleh masing-masing klon. Proses pembungaan terjadi pada bulan Januari–Februari dan biji siap untuk dipanen pada sekitar bulan Juli–September. Tidak dijumpai permasalahan di dalam pengiriman contoh benih/biji.

Pada tahun 2006, Perum Perhutani menghasilkan sebanyak 41 ton benih (dari keseluruhan 53 ton benih yang dikumpulkan) — 33 ton dimanfaatkan untuk kegiatan operasional rutin Perhutani, 3 ton digunakan untuk keperluan sosial kemasyarakatan, dan 5 ton tersedia untuk dijual ke masyarakat umum. Kelayakan benih secara keseluruhan adalah 65%.

Perhutani telah mengumpulkan materi vegetatif 600 tanaman unggulan dari seluruh Indonesia, termasuk Muna, dan melakukan replikasi di bank klonal yang berlokasi di Cepu, Pulau Jawa. Protokol perbanyakan melalui budidaya jaringan telah dilaksanakan untuk sebanyak 12 klon — hal ini tersedia dalam bentuk materi perbanyakan yang telah berakar/siap tanam.

Untuk akses ke materi benih dan klon yang dihasilkan dari budidaya jaringan, silahkan menghubungi:

Ir Sudarsono MBA  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhutani,  
Jln Wonosari – Batokan  
Cepu, Kabupaten Blora  
Jawa Tengah 58302, Pulau Jawa

Ph: +62 296 421233  
Fax: +62 296 422439

Salinan surat dikirimkan ke Ir Sarkoro Doso (Wakil Kepala, Pengembangan) dan Ir Wahid (Wakil Kepala, Penelitian)

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pusat pembibitan jati di Kabupaten Konawe Selatan, Muna dan Buton, dimana masing-masing memiliki kapasitas dua juta tanaman.





---

## 7 Interaksi Masyarakat dan Peran *Tropical Forest Trust*

Di Kabupaten Konawe Selatan, masyarakat dari 46 desa di empat buah kecamatan telah membentuk sebuah koperasi yang dinamakan Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) pada tahun 2003. Koperasi ini beranggotakan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan dan dibentuk sebagai bentuk tanggapan terhadap perundangan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tentang hutan kemasyarakatan dimana masyarakat diijinkan untuk mengelola lahan hutan milik pemerintah. Kelompok-kelompok masyarakat dibentuk di setiap desa dan menjadi basis forum tingkat kecamatan yang kemudian diwadahi oleh sebuah forum tingkat kabupaten. Dinas Kehutanan memiliki sejumlah wilayah dengan luas keseluruhan 38.959 ha yang tersedia untuk dikelola sebagai hutan kemasyarakatan. Lembaga koperasi ini dijadikan sebagai lembaga payung di tingkat kabupaten dimana masyarakat dapat beroperasi dan bernegosiasi – mengurus ijin penebangan, berhubungan dengan LSM dan lain sebagainya. Akan tetapi, setelah pembentukan KHJL, tetap terdapat kebingungan tentang status dan interpretasi atas perundangan hutan kemasyarakatan, sehingga perijinan untuk memberikan wewenang pengelolaan lahan hutan belum bisa dikeluarkan.

LSM JAUH, dan TFT hadir di kabupaten ini pada tahun 2004 untuk mengkaji potensi kayu jati di daerah ini. Sebuah nota kesepakatan ditandatangani antara KHJL dan TFT untuk bekerjasama melakukan sertifikasi atas sumber daya jati yang dimiliki oleh masyarakat. KHJL kemudian beralih dari mengurus pengelolaan hutan kemasyarakatan menjadi mengurus masalah sertifikasi lahan perkebunan yang dimiliki oleh pribadi. Dari lahan awal seluas 38.959 ha yang rencananya akan dialokasikan, 24.000 merupakan lahan budidaya jati, 30% (8000 ha) merupakan lahan cadangan. Dari 46 desa yang ada, terdapat 12 desa yang hutannya telah disertifikasi (melibatkan 192 rumah tangga). TFT dan JAUH menawarkan pelatihan kepada KHJL (dan para anggotanya) tentang pengelolaan hutan, teknologi pembibitan, silvikultur, manajemen keuangan, penggunaan GIS dan manajemen korporasi.

Sejak memperoleh sertifikasi FSC pada tahun 2005, sebanyak 20 kontainer balok kayu jati telah dikirim ke pihak industri di Pulau Jawa. Pada tahun 2006, 13 unit tambahan (desa maupun kumpulan beberapa desa) telah ditambahkan ke dalam wilayah yang bersertifikat (pada saat ini menjadi 25 unit dan 571 rumah tangga), sehingga total sumber daya jati bersertifikat menjadi 575 ha (Barr 2006).

Dari luas awal sebesar 38.959 ha, hanya 28.116 ha yang layak untuk dikelola di bawah Program Hutan Tanaman Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan perundangan di tingkat nasional.

Di dalam KHJL, terdapat tiga bagian:

- Manajemen dan Pemasaran Produk Hasil Hutan (utamanya kayu jati)
- Simpan Pinjam
- Peternakan. Koperasi telah menyalurkan sebanyak 100 ternak sapi di bawah program pengembangan peternakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.

Koperasi juga bertindak sebagai fasilitator bagi para anggotanya di dalam berhubungan dengan program-program Pemerintah Indonesia lainnya yang mencakup berbagai macam komoditas pertanian, hortikultura, misalnya jambu mete, kakao dan lada. Koperasi ini juga membentuk sebuah Kelompok perempuan untuk menangani kebutuhan kaum perempuan di

masyarakat, dan sejauh ini telah melaksanakan sejumlah kegiatan pelatihan singkat tentang teknik pembibitan sayuran dan tanaman jati.

Bagian Simpan Pinjam KHJL cenderung merupakan bagian terlemah dari koperasi ini. Salah satu daya tarik koperasi bagi para anggotanya adalah mereka dapat memperoleh pinjaman uang ketika mereka membutuhkannya (untuk keperluan pesta pernikahan anak atau kematian anggota keluarga). Akan tetapi koperasi pada saat ini tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mendanai seluruh permintaan yang ada. Pada saat ini, ketentuan pembayaran pinjaman yang berlaku adalah setiap tanggal tujuh, lima belas dan dua puluh satu setiap bulannya. Pada tanggal selain tanggal-tanggal tersebut maka tidak ada dana yang tersedia. Ketua koperasi telah berupaya sebaik mungkin untuk menemukan sumber pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan keuangan para anggotanya, akan tetapi besaran suku bunga komersial yang berlaku cenderung tidak memungkinkan (6% per tahun vs 3% per tahun apabila melalui koperasi). Para anggota umumnya memiliki aset yang signifikan dalam bentuk kumpulan pohon jati yang dimiliki. Terdapat peluang untuk melaksanakan sebuah skema pembiayaan mikro yang dikembangkan berdasarkan struktur koperasi dan aset pohon yang dimiliki oleh anggota koperasi — mereka mungkin tidak memiliki uang tunai yang memadai tetapi memiliki aset yang banyak (dalam bentuk pohon jati yang dimiliki). Model pembiayaan mikro untuk koperasi ini masih dikembangkan dan para anggota belum meyakini model yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Manajemen senior KHJL mengindikasikan bahwa mereka sangat mengharapkan petunjuk independen tentang pilihan-pilihan yang memungkinkan bagi mereka. ACIAR dapat secara realistis menelusuri serangkaian pilihan pembiayaan mikro yang sesuai bagi para penduduk desa yang miskin tetapi memiliki aset dalam bentuk pohon jati.

Koperasi memiliki sebuah database yang mencatat jumlah pohon jati yang dimiliki oleh para anggotanya. Terdapat antusiasme yang besar di tingkat lokal untuk membudidayakan tanaman jati — ketika mereka memulai kegiatannya pada tahun 2003 para anggotanya menyepakati untuk menanam sebanyak sepuluh pohon baru untuk setiap pohon yang ditebang — pada saat ini mereka memiliki anggota yang menyarankan untuk melakukan penanaman sebanyak 1 ha untuk setiap pohon yang ditebang! Masyarakat luas di dalam kabupaten ini — mulai dari pegawai negeri senior, hingga polisi dan petani — dilibatkan di dalam pembudidayaan jati dan KHJL berharap bahwa jumlah anggotanya (pada saat ini berjumlah lebih dari 500 orang) dapat meningkat seiring dengan keberadaan berbagai sumber daya baru.



---

## 8 Perdagangan dan Pengolahan Jati di Provinsi Sulawesi Tenggara

Hampir seluruh industri pengolahan kayu di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki fasilitas penggajian, yang dilengkapi dengan kegiatan usaha pengolahan bernilai tambah yang rendah (perabot, pertukangan kayu lokal) untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sebagian besar jati yang dikirim keluar dari Provinsi Sulawesi Tenggara masih dalam bentuk gelondongan, gergajian kasar atau balok (Gambar 5a).

Fasilitas penggajian tersebar di seluruh wilayah provinsi ini, dan dari tempat-tempat ini kayu balok (Gambar 5b) dikirim ke Kendari untuk dikapalkan ke Pulau Jawa dengan menggunakan kontainer. Pada tahun 2004 terdapat pasar ekspor yang menguntungkan untuk kayu gelondongan-gergajian kasar di Hong Kong, Taiwan dan China — nilai ekspor pada waktu itu adalah US\$ 6,7 juta (nilai rata-rata FOB sebesar US\$ 634 /ton). Sebagai upaya untuk mempersiapkan Indonesia untuk keanggotaan di WTO, maka Departemen Perdagangan mengeluarkan peraturan bahwa seluruh kayu gergajian yang akan diekspor harus berbentuk kayu kering. Dengan adanya persyaratan ini, maka para produsen di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat bersaing dan pada tahun 2005 perdagangan kayu di daerah ini jatuh hingga sebesar US\$ 81.000 (nilai rata-rata FOB sebesar US\$ 653 /ton). Departemen Perdagangan sementara melaksanakan upaya promosi untuk menarik berbagai industri pengolahan bernilai tambah untuk memasuki sektor industri perikanan dan kehutanan, akan tetapi skala ekonomi sebagaimana yang ada di pusat-pusat kegiatan di Pulau Jawa misalnya Surabaya dan Semarang tidak tercapai (Gambar 5c, 6c). Selain itu, terdapat keterbatasan prasarana lokal untuk mengelola kontainer dan untuk terhubung secara langsung dengan pelabuhan-pelabuhan internasional. Juga terdapat kekurangan keahlian lokal di dalam menangani pasar produk kayu internasional yang rumit.

Perdagangan internasional didukung oleh pihak pemerintah provinsi, akan tetapi terkendala oleh keberadaan prasarana yang terbatas dan adanya keharusan untuk melakukan ekspor melalui pelabuhan-pelabuhan utama yang terdapat di Pulau Jawa. Departemen Perdagangan berkeinginan untuk meningkatkan mutu pengeringan kayu di Sulawesi untuk mencapai standar yang ditentukan oleh industri pengolahan di Pulau Jawa. Dalam jangka waktu pendek merupakan hal yang sulit bagi industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bersaing dengan industri perabot besar dan kompleks (serta mapan) yang ada di Pulau Jawa.

Kesimpulan ini disampaikan oleh pihak industri pengolahan, yang telah memutuskan untuk memindahkan operasi mereka ke daerah lain atau membatasi usahanya hanya pada kegiatan ekspor balok kayu.



**Gambar 5. (a) Balok kayu yang siap untuk dikumpulkan, Kabupaten Konawe Selatan (2209);**

**(b) Kumpulan jati gergajian yang dimiliki oleh para tukang kayu di desa, Kabupaten Konawe Selatan (2189);**

**(c) Kayu mahoni yang dibudidayakan untuk keperluan pembuatan daun pintu, unit pengolahan Perhutani, Cepu, Pulau Jawa (2224)**



**Gambar 6. Contoh-contoh perabot jati. (a), (b) Perabot jati lokal, Kabupaten Konawe Selatan (2196, 2194); (c) Perabot ruangan luar untuk pasar ekspor, unit pengolahan Perhutani, Cepu, Pulau Jawa (2213)**



---

## 9 Rantai Penawaran Kayu Jati dan Bisnis Perabot

Kayu jati Indonesia utamanya digunakan di dalam industri perabot. Sejak tahun 2000 hingga 2005, industri perabot ekspor Indonesia bertumbuh sebesar 17%, dan saat ini bernilai sebesar US\$ 1,8 miliar setiap tahunnya (Development Alternatifs Inc. 2007). Pasar tujuan terbesar adalah AS dan Eropa.

Rantai pasokan jati bersifat kompleks dan tidak untuk mereka yang tidak siap. Proyek IFC/PENSA, di dalam 'Studi Rantai Penawaran Kayu Gergajian', menyebutkan rincian dokumentasi yang dibutuhkan untuk pengesahan pergerakan pengangkutan kayu jati gelondongan maupun gergajian di Pulau Jawa — walaupun pohon tersebut dibudidayakan di lahan milik pribadi (Gambar 7). Kerumitan ini juga dicerminkan oleh catatan temuan *Tropical Forest Trust* (Lampiran 1 dan 2) dan Perum Perhutani (2001).

Laporan PENSA juga menampilkan diagram tentang rantai penawaran jati, yang mengkonfirmasi kompleksitas yang terjadi (Gambar 8).

Industri pengolahan kayu jati memberikan kontribusi yang penting bagi perekonomian lokal banyak kabupaten di Pulau Jawa. Kesejahteraan industri-industri ini bergantung pada kestabilan pasokan kayu jati dari Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara lain Sulawesi. *Triple Line Consulting* (2005) melaporkan adanya kesulitan yang sangat besar di dalam memperkirakan jumlah industri yang berbahan baku jati. Terdapat banyak usaha penggergajian dan pembuatan perabot yang tidak terdaftar secara resmi. Perkiraan kasar mengindikasikan bahwa:

- Terdapat sekitar 6000 perusahaan pembuatan perabot berskala menengah hingga besar di Indonesia, dimana sekitar 2.300 terdapat di Jawa Tengah dan Timur.
- Hanya sebanyak 678 yang aktif mengekspor hasil produksi mereka
- Di Jawa Tengah sendiri terdapat sekitar 8400 perusahaan pembuat perabot dan kerajinan tangan dengan berbagai skala
- hampir sekitar satu juta industri berbasis rumah tangga dan berskala kecil yang tidak terdaftar bertindak sebagai sub-kontraktor bagi perusahaan-perusahaan yang lebih besar.

Salah satu pusat industri perabot dan ukiran berbahan kayu jati yang paling besar adalah Jepara di Jawa Tengah yang memiliki lebih dari 1500 perusahaan yang mengolah kayu jati. Ekspor perabot berbahan kayu jati dari Jepara bernilai lebih dari US\$ 123 juta pada tahun 2005.

---

### 9.1 Perusahaan-perusahaan berbahan kayu jati

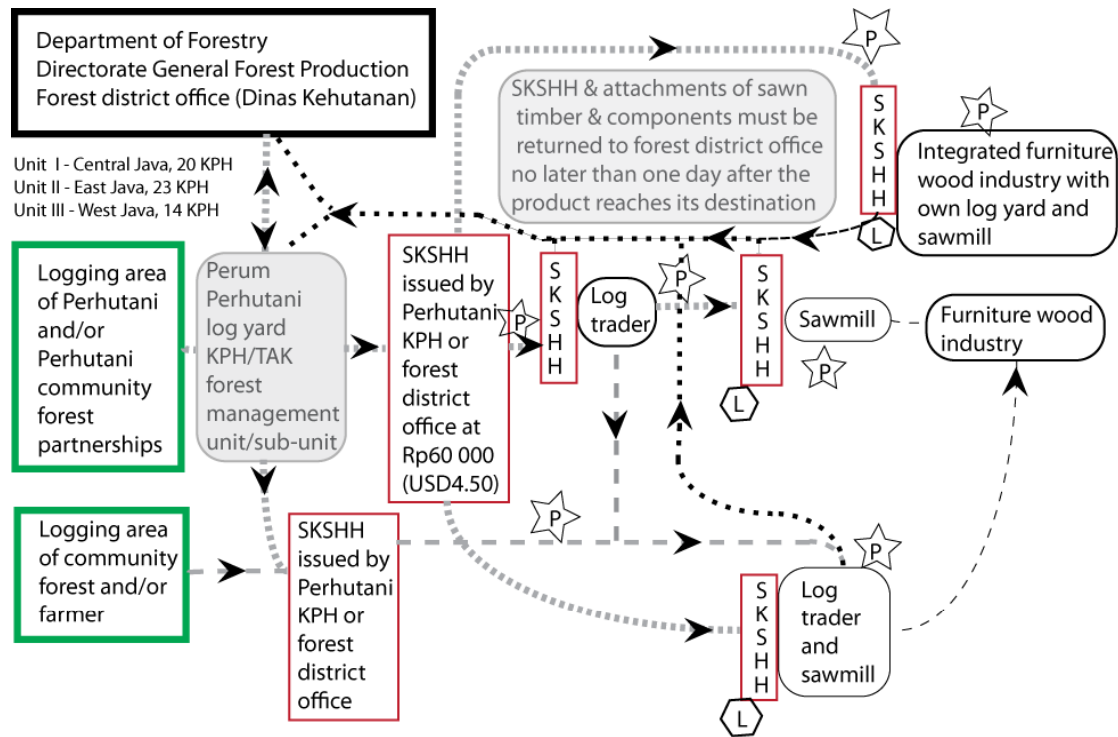
#### 9.1.1 Perusahaan berskala kecil

Usaha yang dijabarkan di bawah ini merupakan tipikal perusahaan keluarga yang terdapat di Jepara, Jawa Tengah.

Usaha ini hanya menggunakan bahan dari kayu hasil budidaya — utamanya kayu jati dengan pilihan bahan baku lain seperti kayu pohon nimba (*Azadirachta indica*), *Dalbergia speciosa*, mahoni dan akasia — bergantung pada pesanan pelanggan mereka. Mereka tidak mencampur berbagai jenis kayu dalam satu produk perabot. Pada saat ini mereka juga menggunakan kayu pohon durian dan nangka (untuk bahan kusen jendela dan pintu).

Umumnya mereka menjual hasil desain mereka sendiri kepada para pelanggan, tetapi terkadang juga para pelanggan memesan model desain tertentu. Umumnya bahan baku kayu dipasok dari pedagang grosiran yang mengetahui kebutuhan mereka dan yang berhadapan langsung dengan berbagai tantangan dalam hal perijinan dan pengangkutan kayu tersebut. Mereka mencampur bahan kayu jati kategori A1, A2 dan A3 ke dalam produk-produk mereka bergantung pada jenis produk yang dibuat (misalnya, bagian atas meja dibuat dari bahan kategori A3, kaki meja dari bahan kategori A2 dan rangka dari bahan kategori A1). Akasia hanya digunakan pada saat diminta oleh pelanggan.

Umumnya produk yang dihasilkan diperuntukkan untuk keperluan ekspor. Kayu-kayu hasil pemotongan dikirim ke pabrik rekanan yang memiliki fasilitas penyambungan/laminating. Bahan-bahan yang terlalu kecil untuk disambung akan digunakan sebagai bahan bakar mesin pengering. Harga untuk materi sisa bervariasi bergantung pada ukuran, tetapi umumnya dijual dengan harga Rp. 6,5 juta/m<sup>3</sup> = Rp 2,2 juta untuk truk berukuran kecil. Usaha ini memasok bahan baku kayu balok dalam jumlah yang signifikan dari Sulawesi. Mereka menggunakan kayu dari pohon akasia (*Acacia mangium*) sebagai pengganti kayu jati apabila diminta oleh pelanggan. Pengeringan kayu merupakan suatu hal yang mendasar. Untuk musim kemarau, papan-papan kayu dijemur di bawah sinar matahari; pada saat musim hujan, mereka menggunakan mesin pengering berbahan bakar kayu yang tidak efisien.



Notes-

SKSHH = Surat Keterangan Sah Hasil Hutan

The Perum Perhutani log yards normally act as forest district offices, issuing SKSHH documentation

= List of sawn timber and other produce attached to SKSHH by sawmills when officially reporting back to the district forest office/Perhutani

= The official pathway of SKSHHs from district forest offices/Perhutani to industry

= The official return pathway of SKSHHs from industry

= The official pathway of SKSHHs for logs from community forests or farmers. In practice, however, official legal documents are rarely issued by forest offices.

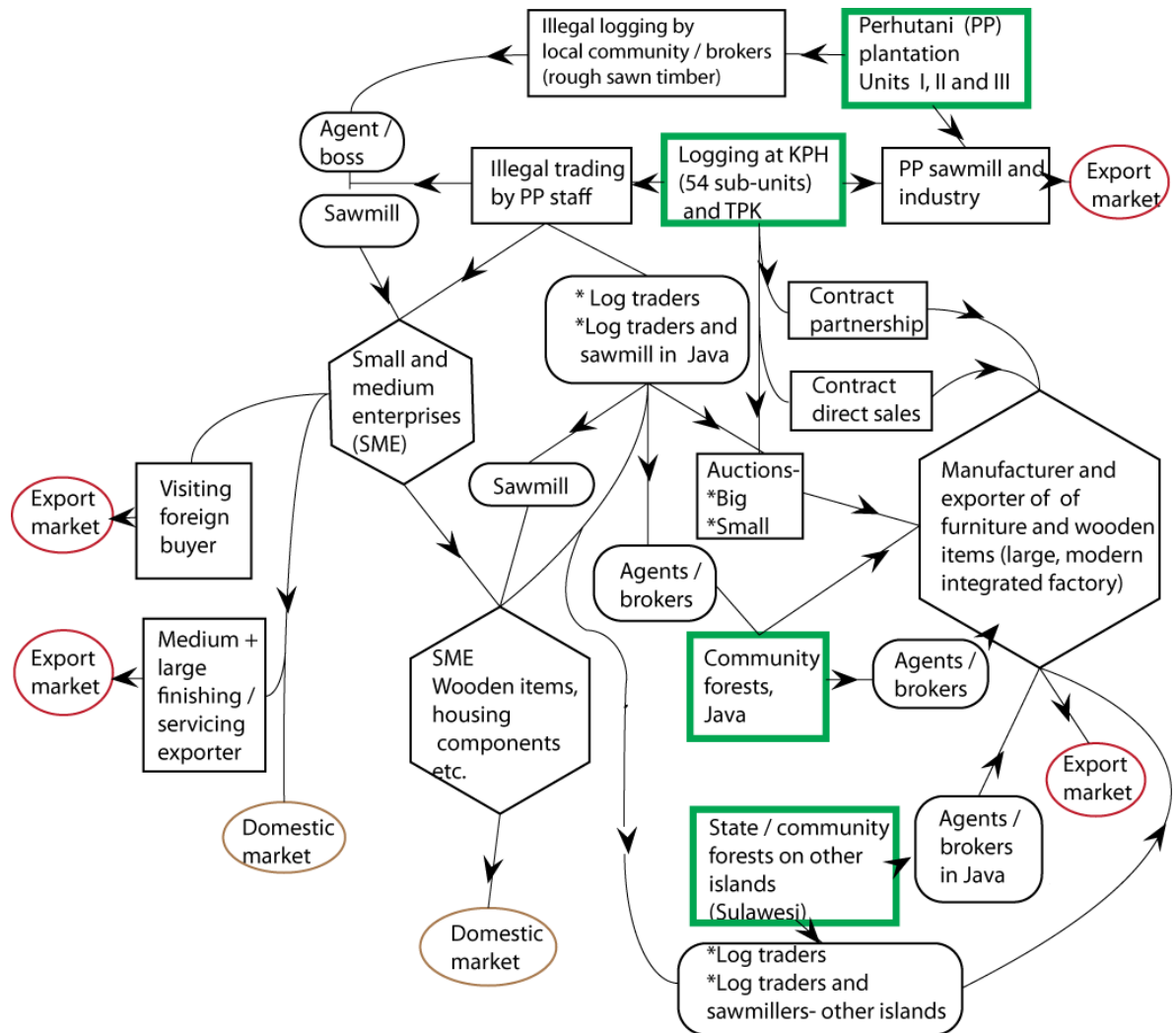
= Larger integrated furniture wood industries (but not small or medium enterprises) do provide SKSHH returns as they are frequently inspected/checked by local police and/or regional offices

= Inspection along log or sawn timber transport routes throughout Java by one or more of the following offices:

- regional, district or local police
- regional, district or local government offices
- district and local forest police

**Gambar 7. Dokumentasi yang dibutuhkan untuk kesahan pengangkutan kayu jati gelondongan maupun gergajian di Pulau Jawa (Triple Line Consulting 2005)**





**Gambar 8. Diagram rantai penawaran kayu jati (Triple Line Consulting 2005)**

Pemilik kayu lebih memilih untuk mengeringkan kayu di bawah sinar matahari agar kayu tetap kuat. Pasar ekspor mewajibkan tingkat kelembaban (*moisture content/MC*) sebesar 13–14%. Apabila mereka menggunakan kayu mahoni, maka tingkat MC yang diwajibkan adalah 12–13%. Perabot jati mereka disimpan di dalam sebuah gudang selama tiga bulan sebelum dikapalkan yang bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya keretakan akibat perubahan tingkat kelembaban. Biaya pengangkutan kayu gelondongan ke tempat pengolahan adalah:

- A1 16–19 cm sed Rp. 2 juta/m<sup>3</sup>
- A2 22–28 cm sed Rp. 3,5 juta/m<sup>3</sup>
- A3 >30 cm sed Rp. 6,0 juta/m<sup>3</sup>.

Banyak usaha kreatif berskala kecil yang terlibat di dalam kegiatan ukiran kayu dan pembuatan perabot di Jepara — dengan menggunakan bahan dari kayu jati, mahoni, akasia

(sangat sedikit), *Dalbergia speciosa*, durian, mangga, nangka dan sejumlah kecil kayu trembesi (*Samanea saman*) — semuanya merupakan pohon budidaya. Sektor ini sangat kompetitif dan kreatif dalam hal desain, menggunakan gaya lama maupun baru dan memadukan bahan baku kayu muda dan tua (misalnya, kayu tua dari hasil bongkaran rumah, dan bantalan rel kereta api) di dalam membuat berbagai perabot yang sangat menarik.

### 9.1.2 Perusahaan yang lebih besar

Perusahaan pembuat perabot yang berskala lebih besar dan lebih kompleks diwakili oleh unit pengolahan Perum Perhutani Perabot di Cepu, Jawa Tengah. Unit produksi milik Perhutani ini umumnya hanya menggunakan bahan baku kayu jati kategori A3 dan kayu mahoni untuk produk yang dihasilkannya. Produk tersebut dijual di pasar-pasar premium yang terdapat di AS dan Eropa (dan sejumlah kecil di Jakarta). Kayu dipotong di tempat penggajian terdekat untuk menghasilkan papan kayu setebal 30 mm. Kayu ini dikeringkan dengan menggunakan oven — selama satu minggu — untuk mencapai MC 8–12%. Unit ini hanya menggunakan bahan baku kayu dari perkebunan milik Perhutani. Biaya pengangkutan kayu ke fasilitas penggajian adalah sebesar Rp 4,5 juta/m<sup>3</sup> untuk kayu kategori A1, A2 dan A3.

Produk-produk yang dihasilkan antara lain adalah perabot ruang luar, berbagai macam pintu, lantai kayu dan perabot dalam ruang, misalnya meja dan kursi. Pemolesan/penyelesaian akhir bergantung pada kebutuhan pelanggan — normalnya tidak membutuhkan penyelesaian akhir untuk perabot ruang luar. Terdapat juga penggunaan yang ekstensif atas teknik penyambungan yang menggunakan perekat berbahan resin dan politur. Produk yang dihasilkan dimasukkan ke dalam alat pengepresan/laminating selama dua jam, dan kemudian dikeluarkan selama satu hari sebelum dimasukkan ke dalam alat pengerasan.

Di masa lalu, unit ini hanya menjual perabot dari bahan baku terbaik untuk pasar premium — kayu kategori A3. Pasar yang berkembang telah mulai menerima penggunaan bahan baku kategori A2 dan A1 (plus mahoni). Unit ini membayar sebesar US\$ 3.800 /m<sup>3</sup> untuk kayu kategori A3 yang dipotong kasar dan US\$ 3.200 /m<sup>3</sup> untuk kayu kategori A2 dan A1. Tingkat keuntungan untuk keseluruhan kategori adalah sekitar 40%. Direktur unit ini memahami bahwa operator swasta membayar Rp. 4,2–4,7 juta/m<sup>3</sup> untuk kayu balok kategori A3 dari Muna dan Rp. 3,2–4,0 juta/m<sup>3</sup> untuk kayu gelondongan kategori A3 dari Pulau Jawa.

Unit ini menggunakan kayu mahoni yang dibudidayakan di perkebunan milik Perhutani. Kayu jenis ini populer di pasar dan berharga lebih murah daripada kayu jati.



---

## 10 Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO)

Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia, ASMINDO, berpusat kegiatan di Jepara, Jawa Tengah (<http://www.asmindojepara.com/news.php>). Industri perabot dan ukiran kayu Jepara beroperasi di sejumlah kelurahan (Tahunan, Jepara, Pacanan dan lain sebagainya) dan merupakan kontributor utama bagi perekonomian lokal. Terdapat sekitar 1500 usaha rumah tangga berskala kecil di sektor ini, dimana terdapat sebanyak 300 usaha yang cukup besar untuk melakukan kegiatan ekspor mereka sendiri. Hampir seluruh industri di wilayah ini menargetkan pasar ekspor. Setelah terjadi krisis keuangan Asia pada tahun 1997, terdapat penurunan nilai ekspor dalam Dolar AS akan tetapi volume ekspor justru mengalami peningkatan (Tabel 4). Pada kurun waktu 1999-2005 terjadi peningkatan jumlah eksportir, selain itu terdapat lebih banyak negara tujuan ekspor. Tidak semua eksportir menjadi anggota ASMINDO.

Kayu yang umum digunakan di Jepara adalah:

- Jati 60%
- Mahoni 25%
- Spesies lainnya 15%.

Pada tahun 2005–2006 sejumlah industri pengolahan menggunakan kayu Akasia (*Acacia mangium*) sebagai bahan baku pembuatan perabot, walaupun biaya pengeringan jenis kayu ini lebih mahal daripada biaya pengeringan kayu jati. Mahoni dan jati dikeringkan selama 7 hari untuk mencapai tingkat kelembaban 8–10% : *A. mangium* membutuhkan 15–20 hari untuk mencapai tingkat kelembaban 8–10%. Tambahan biaya pengeringan ini sangat signifikan bagi industri yang beroperasi dengan laba yang sangat kecil. Fasilitas pengeringan umumnya terintegrasi dengan usaha penggergajian dan akan melayani sekelompok industri pengolahan. Industri perabot berskala kecil dapat menyewa fasilitas ini jika dibutuhkan untuk memperoleh kayu yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kapasitas normal untuk pengeringan berskala kecil adalah 5–10 m<sup>3</sup> dan sementara untuk pengeringan komersial adalah >20 m<sup>3</sup>.

Para anggota ASMINDO menyadari manfaat penggunaan kayu bersertifikat dan menganggap masalah sertifikasi sebagai isu yang serius. Akan tetapi, dengan banyaknya industri pengolahan berskala kecil dan banyaknya pemasok kayu berkala kecil maupun besar yang menyediakan berbagai macam kayu, maka pengelolaan persyaratan kayu bersertifikat menjadi mustahil. Hanya empat atau lima anggota yang berskala besar yang membeli kayu jati mereka dari sumber-sumber yang bersertifikat.

ASMINDO berkeinginan untuk mengembangkan sebuah konsep pergudangan terpusat yang dapat memasok anggotanya dengan kayu yang bersertifikat — kemungkinan dalam bentuk kayu gergajian kasar yang telah dikeringkan. Hal ini dapat digunakan untuk melayani pesanan dari pelanggan yang menyebutkan dengan jelas ketentuan penggunaan kayu bersertifikat. Mereka telah membahas hal ini dengan pihak Perhutani dan memperoleh dukungan dari USAID melalui proyek SENADA. SENADA adalah proyek berdurasi empat tahun yang didanai oleh USAID untuk mendorong pertumbuhan, membuka lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan melalui peningkatan daya saing industri manufaktur skala kecil yang padat karya di Indonesia — termasuk industri perabot.

**Tabel 4. Industri kayu ekspor Jepara**

Item	Tahun						
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Jumlah nilai ekspor (US\$ juta)	201.42	200.51	74.74	76.11	111.73	138.4	123.65
Jumlah perusahaan pengekspor	221	358	436	451	410	408	402
Jumlah negara tujuan ekspor	64	68	71	88	82	84	81

Sumber: ASMINDO, Jepara. Berdasarkan data Disperindagkop Kabupaten Jepara

Asosiasi ini beranggapan bahwa kegiatan penebangan illegal merupakan keuntungan besar bagi pengguna kayu yang lebih besar, misalnya pabrik kayu lapis, pulp dan *veneer*. Industri perabot menjadi korban dari perilaku menyimpang industri-industri yang lebih besar ini. ASMINDO menginginkan publisitas yang lebih luas tentang kenyataan bahwa para anggotanya di Jepara menggunakan bahan baku kayu dari sumber yang legal.

Masa depan menjadi tidak menentu — para anggota merasa bahwa makin sulit untuk memperoleh pasokan bahan baku kayu karena luas hutan yang semakin berkurang. Mereka berharap dikembangkannya luas daerah budidaya untuk mendukung industri mereka. Terdapat sejumlah pesimisme tentang pasokan kayu. Para anggota lebih memilih pasokan kayu dari hutan kemasyarakatan karena harganya lebih rendah daripada harga kayu yang dijual oleh Perhutani dengan mutu yang serupa.

Kayu karet tidak digunakan oleh industri di daerah ini karena berada jauh dari lokasi perkebunan karet.

Persaingan dengan Vietnam, China dan negara lainnya merupakan sebuah isu yang serius, akan tetapi keunggulan alami Jepara adalah dalam hal keahlian serta kreatifitas yang dimiliki oleh para pengukir kayunya, dimana hal ini menjadi pendukung utama industri di wilayah ini. Mempertahankan produk berstandar tinggi beserta kreatifitasnya merupakan suatu hal yang penting.

Pandangan ASMINDO tentang masa depan mencakup sebuah keinginan untuk mewujudkan sebuah sistem pergudangan/pemasaran terpusat untuk kayu yang memiliki standar yang sesuai dengan kebutuhan para anggotanya— kayu gergajian kasar yang kering dan legal (lebih disukai apabila juga memiliki sertifikat) — dari berbagai jenis kayu yang tersedia.

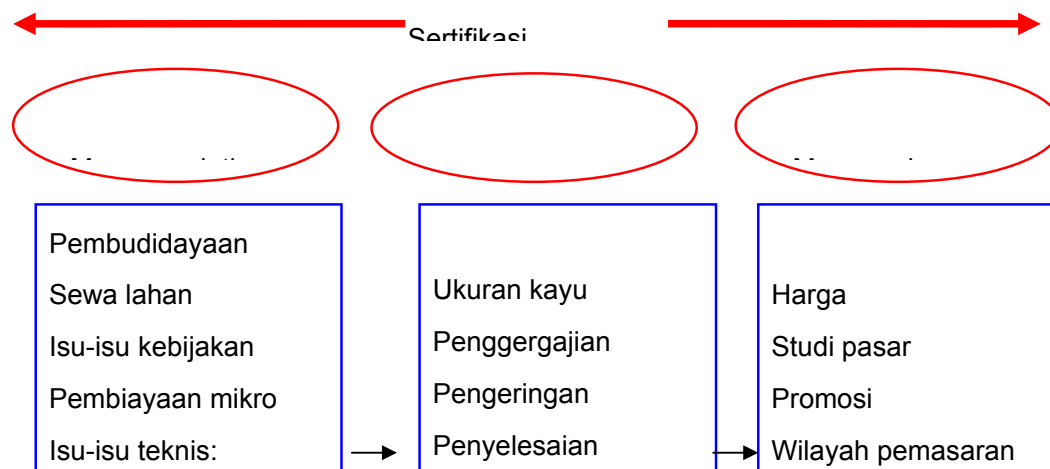


## 11 Kesenjangan pada Analisa Rantai Penawaran yang Ada Pada Saat Ini

Analisa rantai penawaran merupakan bagian penting di dalam persyaratan penelusuran jejak asal kayu di dalam proses sertifikasi. Analisa rantai penawaran kayu jati yang ada pada saat ini berfokus pada tiga buah komponen umum: pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran (Gambar 9). Analisa-analisa ini memberikan informasi yang berharga atas ketiga komponen tersebut dan informasi tersebut sendiri telah dimanfaatkan di dalam kegiatan operasional. Akan tetapi sebenarnya terdapat sebuah komponen utama yang hanya memperoleh perhatian yang terbatas, yaitu pemanenan dan pengangkutan.

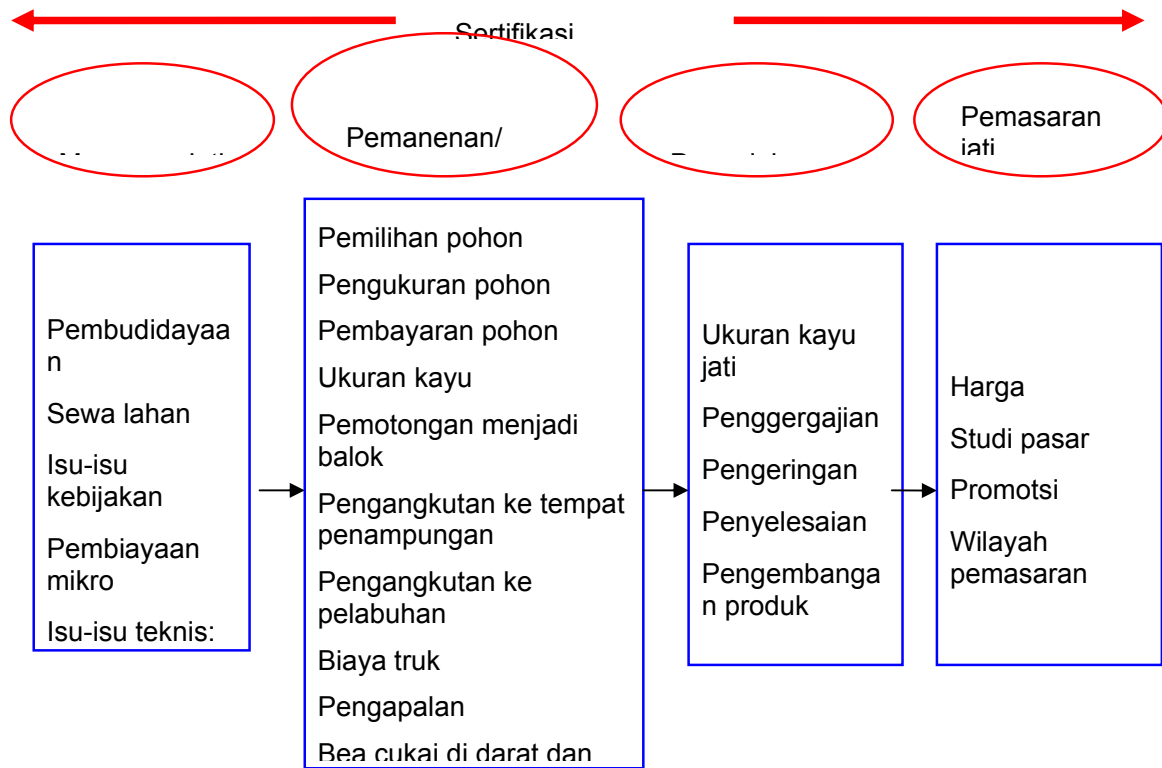
Pemanenan dan pengangkutan umumnya dapat mencakup sekitar 70% dari biaya kayu yang diantar hingga ke lokasi penggergajian. Proses antara penebangan pohon hingga pengantaran ke lokasi penggergajian (dimana kegiatan pengolahan secara tipikal dimulai) sebagian besar dilaksanakan oleh usaha berskala kecil yang memiliki pemahaman yang rendah tentang proses yang layak. Terdapat peluang untuk mempelajari dan memahami komponen pengangkutan yang penting ini dan mengidentifikasi potensi efisiensi yang bisa diraih. Pertanyaan-pertanyaan yang akan ditelusuri ditampilkan pada Gambar 10 dan mencakup:

- bagaimana pohon dipilih untuk ditebang dan bagaimana cara mengangkutnya hingga ke jalan utama?
- siapa yang melakukan pengukuran atas pohon dan bagaimana cara menyepakati volume yang diukur?
- bagaimana cara batangan kayu diangkut dan dikirim ke tempat penampungan kayu lokal dan kemudian dibawa ke pelabuhan?
- siapa yang mengelola pengiriman kayu dari Sulawesi Tenggara ke Pulau Jawa?



**Gambar 9. Komponen analisa rantai penawaran**





**Gambar 10. Komponen-komponen yang disarankan untuk perubahan analisa rantai penawaran**



---

## 12 Kesimpulan dan Rekomendasi

---

### 12.1 Permintaan pasar

Industri perabot tujuan ekspor Indonesia bergantung pada keberlangsungan ketersediaan pasokan bahan baku kayu bermutu tinggi, termasuk jati. Terdapat peningkatan permintaan pasar yang kuat atas pasokan kayu jati di Indonesia dan peningkatan permintaan atas kayu jati yang memiliki sertifikasi sesuai dengan standar internasional. Sebagai tanggapan terhadap kebutuhan ini, terjadi peningkatan atas jumlah petani kecil yang membudidayakan jati dan potensi lahan secara nasional untuk digarap oleh petani kecil, yaitu sebesar 1,2 juta ha (Nawir dan Manalu 2006). Nawir dan Manalu melaporkan data statistik terkini dari Departemen Kehutanan dan Badan Pusat Statistik yang mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 3,1 juta rumah tangga yang secara langsung terlibat di dalam kegiatan pertanian di lahan hutan, termasuk pembudidayaan jati. Sumber daya berbasis pertanian yang non-formal ini merupakan bagian integral dari rantai penawaran untuk ekspor produk industri jati Indonesia.

Sebagai tambahan terhadap terjadinya peningkatan pembudidayaan jati di lahan-lahan pribadi, terdapat kebijakan pemerintah di Indonesia untuk memfasilitasi pengelolaan wilayah hutan oleh masyarakat. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam kurun waktu tiga tahun akan terdapat sekitar 24.000 ha kawasan budidaya jati yang akan diserahkan kelolaan kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu dari inisiatif terbesar di sektor kehutanan yang layak untuk didukung.

Sejalan dengan peningkatan permintaan di wilayah lainnya di Indonesia dan didukung oleh hubungan yang telah terjalin sejak lama antara pembudidaya jati di Sulawesi Tenggara dan pihak industri pengolah di Pulau Jawa, maka dapat disimpulkan bahwa prospek pasar untuk kayu jati Sulawesi Tenggara sangat menjanjikan. Perluasan komersial atas sumber daya jati Indonesia akan bergantung pada perluasan keterlibatan petani kecil di industri ini. Keberhasilan perluasan ini dan jaringan kerjasama yang lebih efektif dengan pasar internasional akan membutuhkan bantuan informasi maupun dukungan dimana ACIAR dapat berkontribusi.

---

### 12.2 Perilaku Masyarakat

Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat mendukung upaya perluasan pembudidayaan jati oleh para petani kecil. Upaya *Tropical Forest Trust* (TFT) untuk secara lebih efektif menghubungkan petani kecil di dalam rantai pasar perlu untuk dihargai. Pengalaman TFT menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah rumah tangga yang meyakini masa depan kayu jati dan kemudian terlibat di dalam koperasi kehutanan di Kabupaten Konawe Selatan. Misi studi ini menyaksikan terjadinya peningkatan rasa saling percaya di antara pihak otoritas kehutanan tingkat provinsi dengan masyarakat.

Secara tradisional, perkebunan jati di Indonesia dilaksanakan secara tumpang sari. Pada wilayah seperti Pulau Jawa dimana terdapat tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan sangat membutuhkan lahan, maka sistem tersebut sangat efektif. Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah daerah yang memiliki luasan lahan yang berlimpah tetapi di sisi lain memiliki jumlah pengguna yang sedikit — daerah ini memiliki lahan untuk dimanfaatkan tetapi hanya sedikit orang yang bisa memanfaatkannya untuk kegiatan budidaya. Terdapat kemungkinan untuk pemaduan dengan kegiatan peternakan, tetapi pada kondisi saat ini para petani menyatakan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya untuk membeli maupun memelihara ternak dalam jumlah yang signifikan.

---

## 12.3 Isu-isu teknis

Indonesia memiliki sejarah panjang di dalam pengelolaan perkebunan jati, umumnya pada rotasi yang panjang — 60 tahun atau lebih. Pertanian rakyat cenderung melakukan budidaya dengan masa rotasi yang jauh lebih pendek (<20 tahun) dan dengan hanya sedikit input silvikultur (*silvicultural*), misalnya pemangkasan maupun penjarangan tanaman. Walaupun tidak terdapat indikasi keterbatasan ketersediaan plasma nutfah, namun tampaknya terdapat hambatan komunikasi di antara pihak yang memiliki sumber daya plasma nutfah bermutu dan pihak yang membutuhkannya.

---

## 12.4 Prospek Kontribusi ACIAR

Studi ini mengidentifikasi sejumlah wilayah dimana kegiatan penelitian yang didukung oleh ACIAR dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan profitabilitas rantai bisnis kayu jati. Tema-tema berikut ini diajukan untuk peluang kerjasama penelitian dengan pihak masyarakat, perusahaan pengolahan swasta, lembaga pemerintah, lembaga penelitian dan LSM:

### 12.4.1 Di Sulawesi

- *Pembiayaan mikro* — Peluang untuk pelaksanaan kegiatan pembiayaan mikro bagi para petani jati yang memiliki keterbatasan dana tunai tetapi memiliki aset berlimpah berupa pohon jati. Mereka menghadapi permasalahan di bawah sistem yang berlaku saat ini. Apakah aset pohon yang dimiliki oleh para petani kecil dapat dijadikan sebagai jaminan di dalam negosiasi pembiayaan mikro? Apa yang menjadi faktor sosial ekonomi yang mendukung sistem pembiayaan mikro sehingga dapat berhasil?
- *Tabel volume dan panen* — Pembuatan tabel volume dan faktor-faktor yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Konawe Selatan — apakah tabel panen yang berasal dari Pulau Jawa cocok untuk digunakan di wilayah ini? Apakah tabel tersebut cocok untuk tanaman jati yang dibudidayakan di lahan pekarangan? Apakah faktor kerugian standar untuk konversi dari volume pohon utuh menjadi volume kayu balok (pada saat ini sebesar 30%) telah realistis? Faktor ini dikembangkan untuk kayu balok yang diolah di tempat penggergajian — pengolahan orang secara individual dengan menggunakan mesin gergaji yang presisi kurang baik tentunya akan menyebabkan lebih banyak potongan yang tersia-siakan.
- *Pengkajian* — Pengkajian yang akurat atas volume kayu yang dibudidayakan di lahan pekarangan dan lahan perkebunan berskala kecil. Berapa besaran sampel yang dapat diterima (selain 100%)? Bagaimana cara menentukan lokasi sampel permanen? Bagaimana cara mengelola sumber daya dan mempertahankan kestabilan pasokan bagi industri? Bagaimana cara menginformasikan kepada pihak industri tentang jumlah kayu yang tersedia? Perkiraan akurat tentang jumlah penebangan tahunan yang diperbolehkan merupakan suatu hal yang penting bagi perencanaan industri dan akan mempengaruhi permintaan pasar dan penawaran harga.
- *Arus kas* — Sumber pendapatan alternatif sambil menunggu masa jati siap dipanen. Apakah terdapat cara untuk mempengaruhi atau meningkatkan arus kas sambil menunggu masa dimana jati siap dipanen, atau selama masa tumpang sari pada tahun 1–3?
- *Ketersediaan tenaga kerja* — Permasalahan ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Konawe Selatan adalah tersedia lahan yang luas tetapi jumlah penduduk yang terbatas.

- *Alokasi dan manajemen sumber daya*— Bagaimana cara mengalokasikan secara merata lahan hutan negara seluas 24.000 ha di bawah Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Konawe Selatan? Apakah alokasi disederhanakan dengan cara pengalokasian 1 ha per rumah tangga, siapa yang akan memperoleh lahan yang terbaik? Ataukah mungkin pengalokasian kepada koperasi maupun lembaga tingkat desa akan lebih adil/tepat? Data sosial ekonomi dibutuhkan untuk mengkaji pilihan-pilihan yang akan diidentifikasi. Apa sistem yang efektif bagi Kabupaten Konawe Selatan? Maupun untuk Buton dan Muna? — masing-masing memiliki sejarah yang saling berbeda. Alternatif perlu untuk dikembangkan dan dibahas secara transparan.
- *Ketersediaan pembibitan yang bermutu* — Mendukung pengembangan pasokan bibit jati bermutu tinggi yang berkelanjutan.
- *Spesies alternatif* — Mendemonstrasikan penanaman pohon mahoni maupun spesies alternatif lainnya misalnya *Palaquim* (nyato); bekerjasama dengan koleksi plasma nutfah mahoni yang dilaksanakan oleh proyek SPRIG AusAID di Pasifik Selatan, dan Fiji.
- *Mycorrhiza* — Tidak terdapat bukti yang memperlihatkan adanya kebutuhan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan *mycorrhiza*. Walaupun terdapat laporan tentang peningkatan pertumbuhan jika menggunakan mycorrhiza pada penelitian di rumah kaca, namun tidak terdapat bukti bahwa peningkatan pertumbuhan tanaman akan berkelanjutan pada uji coba lapangan jangka panjang.
- *Kesejahteraan melalui koperasi* — Sebuah studi sosial budaya tentang masyarakat Kabupaten Konawe Selatan sebagai upaya untuk memahami secara lebih baik mengapa skema koperasi (KHJL) dapat berhasil. Hal ini akan memberikan informasi yang berharga untuk melaksanakan skema yang serupa di Muna dan Buton. Keberhasilan skema koperasi yang baru membutuhkan sebuah pemahaman atas keadaan sosial ekonomi yang beragam di ketiga wilayah.
- *Pengolahan kayu awal* — Analisa usaha untuk pengembangan fasilitas pembuatan kayu balok lokal (mirip dengan fasilitas penggilingan padi tingkat desa) untuk mengurangi kerugian akibat pengolahan oleh orang pribadi dengan menggunakan gergaji mesin yang tidak presisi. Terdapat indikasi bahwa apabila hal ini dilaksanakan maka sebesar 15% kerugian dapat ditekan. (Gergaji mesin juga memiliki biaya operasional yang tinggi apabila diperhitungkan.) Hal ini mungkin dapat dilaksanakan melalui usaha penggergajian yang ada pada saat ini di Kabupaten Konawe Selatan. Seluruh kayu dari Kabupaten Konawe Selatan yang ditujukan untuk pasar ekspor harus diolah melalui fasilitas penggergajian yang bersertifikasi untuk memenuhi ketentuan dinas kehutanan tingkat provinsi. Pada saat ini, fasilitas penggergajian hanya menggunakan alat gergaji berukuran besar untuk menghaluskan balok kayu kasar yang dihasilkan oleh gergaji mesin (justru menambah kerugian!). Para petani cenderung lebih menyukai untuk melakukan pemotongan kayu di lokasi penebangan untuk mengurangi beban ketika mengangkutnya hingga ke jalan utama. Akan lebih baik apabila panjang batangan kayu diperpendek menjadi 1,8 m untuk mengurangi berat kayu bulat. Pelaksanaan sebuah studi tentang potensi kayu bulat vs kayu balok mungkin akan bisa memberikan dampak cepat untuk merubah perilaku ini.
- *Peningkatan pemanfaatan* — Pengkajian atas potensi untuk dapat menggunakan limbah kayu yang dihasilkan oleh proses penggergajian kayu bulat menjadi kayu balok. Dukungan terhadap pelaksanaan studi banding bagi para anggota KHJL ke Jepara, Jawa Tengah, dapat memperlihatkan kepada mereka tentang hal-hal yang bisa dilaksanakan atas potongan-potongan kayu yang memiliki nilai tersebut.

Kunjungan semacam ini juga dapat memberikan kesempatan kepada para petani untuk memahami rantai penawaran kayu jati secara keseluruhan.

#### 12.4.2 Di Pulau Jawa

- *Jadwal pengeringan untuk kayu akasia tropis* — Kayu akasia sangat berlimpah dan murah di Indonesia. Kayu ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku perabot bermutu bagus, akan tetapi pemanfaatannya sangat terbatas akibat keharusan untuk melakukan pengeringan lebih lama — 20 hari untuk mencapai 8–10% MC vs 7 hari bagi kayu jati untuk mencapai kondisi yang sama. Penelitian tentang cara untuk mengurangi masa waktu pengeringan ini akan memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi industri pengolahan berskala kecil.
- *Prakarsa mahoni* — (bekerjasama dengan kegiatan penanaman di Kabupaten Konawe Selatan). Perkebunan mahoni memiliki status pasar yang bagus dimana rantai pemasarannya berpusat di Pulau Jawa. Kayu mahoni terbukti sebagai pohon yang disukai untuk kegiatan hutan kemasyarakatan di Pulau Jawa dan tumbuh dengan baik sebagai tanaman peneduh jalan di Sulawesi Tenggara, dimana bibit pohon ini berasal dari pengenalan yang dilakukan sekitar 100 tahun yang lalu. Terdapat sebuah peluang untuk memperluas basis genetik mahoni dan untuk memulai proses peningkatan mutu pohon. Australia memiliki keunggulan komparatif tentang hal ini melalui sumber daya genetik yang terdapat di Vanuatu dan Fiji yang dikembangkan melalui Proyek SPRIG yang didanai oleh AusAID. Basis ini mencakup materi baru dari Amerika Tengah Dan Selatan. Sebagai persyaratan untuk proyek ini diperlukan sebuah studi kelayakan bisnis — untuk memetakan rantai penawaran industri kayu mahoni di Sulawesi Tenggara dan mengkaji tingkat pertumbuhan, rotasi dan harga yang harus dicapai agar kayu mahoni dapat bersaing dengan kayu mahoni yang tersedia secara lokal di Pulau Jawa.
- *Kerjasama regional* — Pelibatan masyarakat di dalam sektor kehutanan melalui kegiatan budidaya jati berskala kecil menjadi semakin populer di berbagai wilayah di Asia Tenggara. Oleh karena itu merupakan hal yang penting untuk saling berbagi pengalaman sehingga para pendukung kegiatan ini dapat saling belajar. Disarankan untuk memberikan dukungan terhadap partisipasi Indonesia di dalam kegiatan *Pengolahan dan Pemasaran Produk Kayu Jati dari Hutan Budidaya* yang akan dilaksanakan di Peechi, India 25–28 September 2007.

---

#### 12.5 Rekomendasi Tentang Lembaga-lembaga Mitra di Sulawesi Tenggara/Indonesia yang Layak untuk Kegiatan Baru

Terdapat sebuah niat baik yang sangat besar terkait dengan kegiatan budidaya jati di Sulawesi Tenggara dan seluruh stakeholder memperlihatkan keinginan yang sangat besar untuk bekerjasama dengan ACIAR agar kegiatan budidaya jati oleh petani kecil menjadi semakin menguntungkan. Berikut ini adalah beberapa mitra potensial yang dapat menjadi rekanan ACIAR di dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan penelitian yang terkait:

- **Universitas Haluoleo (Unhalu).** Ir Faisa Danu, Dosen Senior, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian
- **Tropical Forest Trust.** TFT telah berhasil membantu koperasi kehutanan di Kabupaten Konawe Selatan untuk memperoleh sertifikasi FSC atas lahan jati yang dimiliki. Koperasi ini memiliki lebih dari 500 anggota dan 400 ha wilayah yang bersertifikat.

- Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, *Forestry Research and Development Agency* (FORDA), Yogyakarta
- **Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.** Ir Suhendro Basori, Kepala Bagian, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari
- **Center for International Forest Research (CIFOR).** CIFOR telah memainkan peran penting di dalam berbagai proyek sukses yang memperoleh dukungan dari ACIAR.
- **World Agroforestry Centre (ICRAF).** ICRAF memainkan peran penting di dalam berbagai proyek jati yang memperoleh dukungan dari ACIAR.
- **SENADA: Indonesia Competitiveness Program.** Pengembangan pangsa pasar internasional melalui strategi sertifikasi pasar 'hijau'. Ini merupakan program yang berfokus pada rantai nilai industri perabot. SENADA merupakan program yang didukung oleh USAID dan berdurasi selama empat tahun, dimana program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta membuka lapangan kerja melalui peningkatan daya saing industri pengolahan berskala kecil yang padat karya.





---

## 13 Proyek-Proyek Lain yang Terkait dengan Kayu Jati

---

### 13.1 Proyek-proyek non-ACIAR yang terkait dengan kayu jati

#### 13.1.1 ITTO: Pengembangan Proses Pemberian Nilai Tambah untuk Kayu Rakyat yang Berotasi Pendek dan Berdiameter Kecil di Pulau Jawa dan Kawasan Timur Indonesia

Pra proyek yang berdurasi empat bulan ini (US\$54.000) bertujuan untuk mempromosikan pengembangan proses pemberian nilai tambah untuk kayu berdiameter kecil yang dihasilkan oleh hutan-hutan rakyat. Sebuah studi tentang perkebunan jati yang dikelola oleh masyarakat lokal mengidentifikasi sejumlah kelemahan dari perkebunan ini, misalnya rotasi yang sangat pendek (<20 tahun) dan kurangnya praktik *silvicultural* yang layak. Kayu jati yang dihasilkan oleh penduduk lokal memiliki batang yang lebih pendek, rentan terhadap peralatan mekanis dan memiliki daya tahan yang rendah akibat proporsi yang lemah atau tidak adanya inti batang kayu. Sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai hambatan teknis ini, maka kegiatan pra-proyek ini bertujuan untuk mengumpulkan data dasar dan informasi terkait tentang perkebunan jati berbasis masyarakat serta pemanfaatannya di Pulau Jawa dan kawasan timur Indonesia. Berdasarkan hasil studi pra-proyek dihasilkan sebuah proposal proyek lengkap yang bertujuan untuk mengembangkan proses pemberian nilai tambah untuk kayu yang berdiameter kecil yang dihasilkan dari proses budidaya yang pendek oleh perkebunan jati yang dikelola oleh masyarakat.

#### 13.1.2 Tropical Forest Trust (TFT), Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara

Di Kabupaten Konawe Selatan, masyarakat dari 46 desa membentuk sebuah koperasi yang dinamakan Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL). Sebanyak hampir dua ratus petani bergabung di dalam koperasi ini. Pada tahun 2004 mereka mulai bekerjasama dengan *Tropical Forest Trust*, sebuah lembaga nirlaba yang berbasis di Swiss, untuk menghilangkan kesenjangan antara praktik pengelolaan yang dimiliki dengan yang dipersyaratkan oleh FSC sebagai wujud pengelolaan hutan yang bertanggungjawab. KHJL mengajukan permohonan pengkajian sertifikasi pada akhir 2004. Setelah dilaksanakannya pengevaluasian lokasi di wilayah hutan yang terdapat di dua belas desa yang terlibat secara aktif di dalam koperasi ini, maka tim audit yang ditugaskan menghasilkan sebuah laporan pengkajian lengkap yang diperiksa oleh *SmartWood*. Pada bulan Mei 2005, petani KHJL menerima sertifikat mereka. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh program *SmartWood* dari *Rainforest Alliance* (2006), sebuah lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh FSC. KHJL melakukan pengapalan perdana atas kayu jati bersertifikatnya pada tanggal 19 Mei 2005.

Sertifikasi KHJL didanai oleh *Tropical Forest Trust* (TFT) dengan dukungan *Castorama France*, bagian dari grup usaha Jysk dan sejumlah pengecer Eropa lainnya — dan PT Intertrend Utama, sebuah industri pembuat perabot taman Indonesia, yang menginginkan pasokan bahan baku kayu jati bersertifikat FSC yang terjamin.

#### 13.1.3 Lembaga Ecolabeling Indonesia (LEI)

Pada tanggal 18 Oktober 2004, Lembaga Ecolabeling Indonesia (LEI) untuk pertama kali memberikan sertifikat pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara berkelanjutan kepada dua buah kelompok masyarakat di Wonogiri yang mengelola kawasan hutan jati dengan

dukungan WWF dan LSM lokal. Pemberian sertifikat pertama ini memungkinkan LEI untuk melakukan pengujian lapangan dan menyempurnakan standar pengelolaan hutan rakyat yang dimilikinya.

Sertifikasi tersebut mencakup sebuah wilayah hutan jati dan mahoni seluas 800 ha. Sejak bulan Juli 2004, WWF telah bekerjasama dengan sejumlah LSM lokal, termasuk ARuPA dan PERSEPSI, untuk mempromosikan kegiatan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan akses pasar di Wonogiri melalui sistem sertifikasi hutan berbasis masyarakat. Kegiatan sertifikasi perintis ini mendemonstrasikan bahwa masyarakat layak memperoleh sertifikasi. Tantangan yang ada pada saat ini adalah untuk membantu masyarakat di dalam mempertahankan manfaat komersial dan lainnya sebagai hasil dari proses sertifikasi. WWF dan lembaga-lembaga mitranya tengah mengembangkan pasar yang menghubungkan masyarakat dengan sebuah pembeli berbasis di Belanda yang telah mengutarakan minatnya untuk menjalin kemitraan jangka panjang dengan kedua komunitas tersebut. Selain itu juga terdapat sejumlah perusahaan Indonesia yang berlokasi di Bali dan Yogyakarta yang telah mengutarakan minat yang sama.

Pada pertengahan bulan Desember 2004, WWF memfasilitasi sebuah pertemuan tentang perkembangan sertifikasi hutan jati rakyat di Pulau Jawa. Perwakilan dari PERSEPSI, ARuPA dan LEI menyepakati untuk mulai memperluas program sertifikasi hutan rakyat yang mereka laksanakan, utamanya di desa-desa lainnya yang ada di Wonogiri, yang pada saat yang sama telah menyatakan ketertarikannya berdasarkan perkembangan yang mereka amati di wilayah tersebut. Selain itu, PERSEPSI juga sedang mengembangkan sebuah rencana untuk memperluas program mereka untuk mencakup wilayah hutan rakyat seluas 20.000 ha di Pulau Jawa.



---

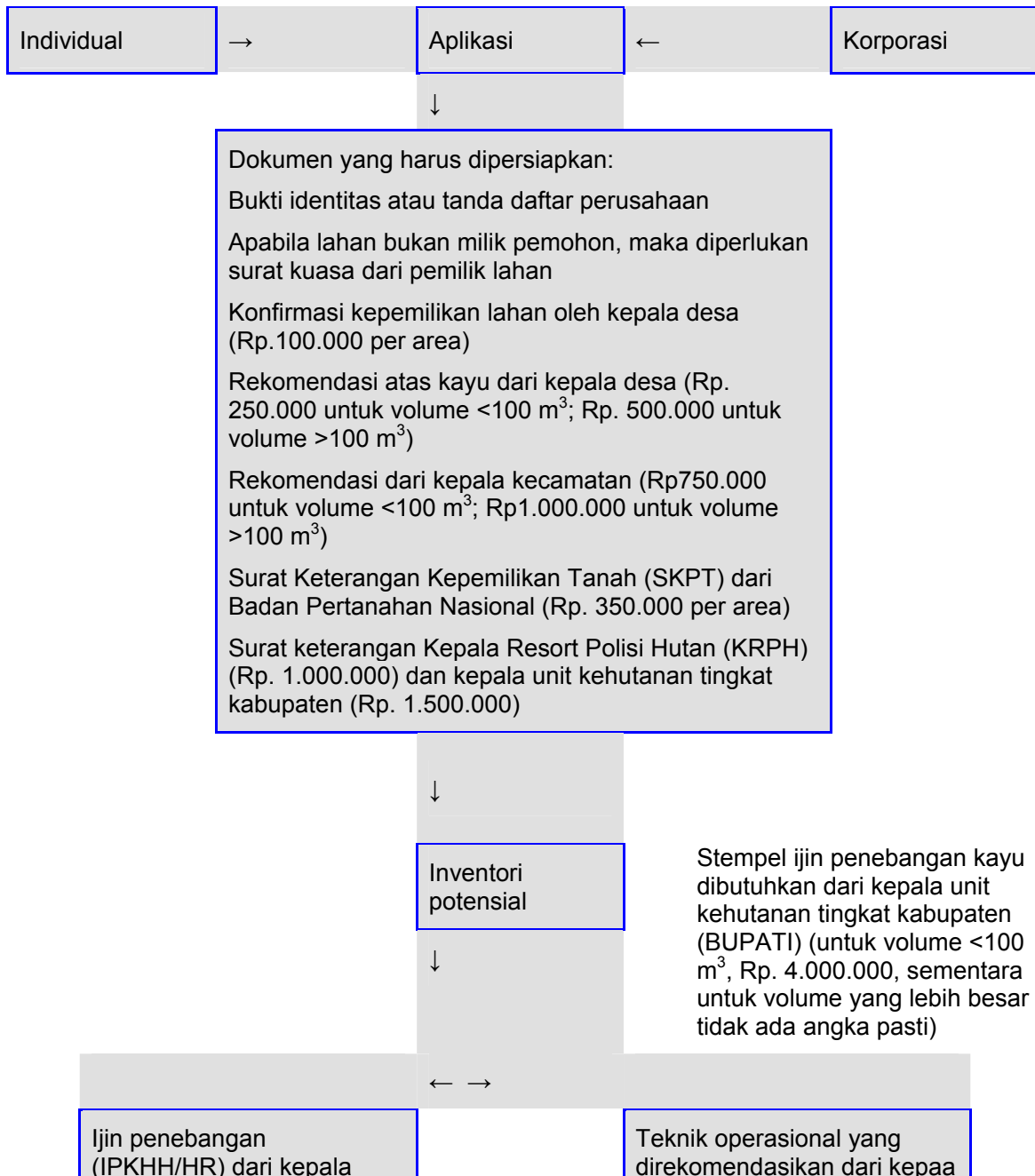
## 14 Daftar Pustaka

- Anon. (1999). General features of Southeast Sulawesi province.  
[http://members.tripod.com/sultra/general\\_feature\\_of\\_the\\_province.htm](http://members.tripod.com/sultra/general_feature_of_the_province.htm)
- Barr, R. (2006). Linking small-scale agroforests to international markets for FSC-certified wood: A case study of the Cooperative for Sustainable Successful Forests, or 'KHJL'. Paper to: *International Conference on Managing Forests for Poverty Reduction: Capturing Opportunities in Forest Harvesting and Wood Processing for the Benefit of the Poor*. 2–6 October 2006, Ho Chi Minh City. Vietnam Tropical Forest Trust, Indonesia. [r.barr@tropicalforesttrust.com](mailto:r.barr@tropicalforesttrust.com).
- Bhat, K.M. and Ma, H.O. (2004) Teak growers unite! In: *ITTO Tropical Forest Update* **14**(1), 3–5.
- Development Alternatives Inc. (2007). *Furniture Industry Value Chain (IVC) Review*. Operational mechanisms and the inter-relationships of firms in the furniture IVC. USAID/SENADA (Indonesia Competitiveness Program), Jakarta, 20 pp.
- Hindra, Billy (2005). *Indonesia Community Forestry 2005*. Community Forestry Status Report, RECOFTC, Bangkok.
- ITTO (2006). Development of value-adding processes for short-rotation, small-diameter community teak plantations in Java and eastern Indonesia. Pre-project proposal submitted by the Directorate of Forest products, Processing and Marketing, Ministry of Forestry, Indonesia.
- Midgley, S.J., Blyth, M., Mounlamai, K., Midgley, D. and Brown A.G. (2007). *Towards Improving Profitability of Teak in Integrated Smallholder Farming Systems in Northern Laos*. Technical Report No. 64, ACIAR, Canberra, 95 pp.
- Nawir, A.A. and Manalu, P. (2006). Overview of farm forestry in Indonesia. Unpublished background document. CIFOR, Bogor. 11 pp.
- Perum Perhutani (2001). Marketing and trade policy of Perum Pehutani. In: Hardiyanto, E.B. (ed.) *Proceedings of Third Regional Seminar on Teak*. 31 July–5 August 2000. Yogyakarta, Indonesia. Perhutani, TEAKNET and Faculty of Forestry, Gadjah Mada University, Indonesia.
- Potter, L. and Lee, J. (1998). Tree planting in South-East Sulawesi: similar trends on a smaller scale. In: *Tree Planting in Indonesia: Trends, Impacts and Directions*. Chapter 4 . Occasional Paper No. 18, CIFOR, Bogor, pp. 47–56. Available at: [http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf\\_files/OccPapers/OP-18-A.pdf](http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-18-A.pdf).
- Rainforest Alliance (2006). *Profiles in Sustainable Forestry: Indonesia's Teak Farms: A Sulawesi Cooperative Supplies Certified Teak to the World Market*. The Alliance, New York, 2 pp. Available at: <http://www.rainforest-alliance.org/profiles/documents/TeakProfile.pdf>.
- Suhaendi, Hendi (1998). Teak improvement in Indonesia. In: Kashio, M. and White, K. (1998) *Teak for the Future. Proceedings of the Second Regional Seminar on Teak*. 29 May–3 June 1995, Yangon, Myanmar. FAO Regional Office for Asia and the Pacific (RAP) RAP Publication 1998/5.
- Triple Line Consulting Ltd (2005). *Sawn Timber Supply Chain Study*. International Finance Corporation Program for Eastern Indonesia SME Assistance (PENSA). London SW15 1AZ, 56 pp



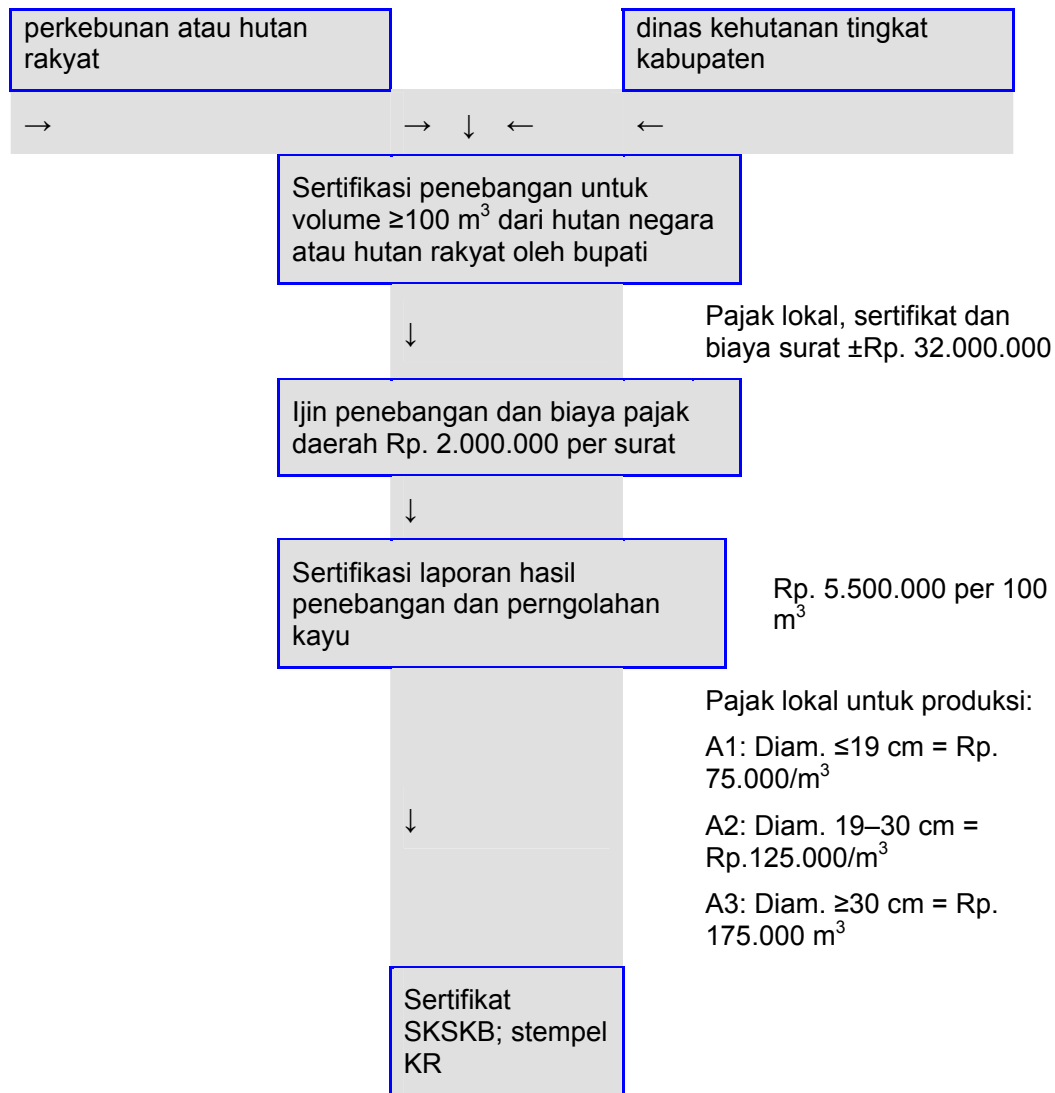
## 15 Lampiran 1<sup>1</sup> Penjualan kayu jati: dokumen dan biaya

Persyaratan administratif untuk melakukan penebangan yang sah dan pendokumentasian lahan budidaya jati untuk kepentingan komersial



<sup>1</sup> Sumber: Tropical Forest Trust (terjemahan tidak resmi dari sebuah dokumen proyek dalam Bahasa Indonesia)







## 16 Lampiran 2<sup>2</sup>. Rincian biaya pengiriman kayu jati

Rekapitulasi perencanaan aktual untuk pengapalan kontainer, 2006

No. Item	Kegiatan	Biaya	
		(Rp)	(%)
A.	Pembelian kayu	350.232.108	43,884
	Subtotal A	350.232.108	43,884
B.	Biaya operasional		
1.	Gaji manajer /biaya operasional permanen	1.257.000	0,158
2.	SKSHH (surat keterangan sah hasil hutan)	13.200.000	1,654
3.	Pengangkutan kayu dari TPn (lokasi pemotongan kayu) ke TPK (lokasi penampungan kayu) dan	44.385.000	5,561
4.	Pengangkutan kayu dari lokasi penggergajian ke Kendari	35.302.000	4,423
5.	Biaya pengangkutan ke kontainer	9.860.000	1,235
6.	Biaya angkutan truk FUSO	7.084.000	0,888
7.	Surat pengesahan kayu dari kepala desa	900.000	0,113
8.	Surat ijin angkut kayu dari KRPH (kepala resort polisi hutan/Perhutani)	1.145.000	0,143
9.	Pengangkutan dan pembongkaran di tempat penggergajian	4.050.000	0,507
10.	Pencucian kayu di tempat penggergajian	56.424.915	7,070
11.	SP3PAD*	2.063.397	0,259
12.	Biaya tidak resmi untuk surat keterangan produk hasil hutan yang sah	3.750.000	0,470
13.	Biaya stempel surat keterangan produk hasil hutan yang sah	400.000	0,050
14.	Biaya PKAPT*	36.492.745	4,573
15.	Biaya dokumen LHP* (Rp. 1.000.000/dokumen)	2.700.000	0,338
16.	Biaya stempel untuk dokumen LHP* (Rp 2.000.000/dokumen)	5.400.000	0,677
17.	Biaya perubahan bentuk kayu (Rp. 3.779.300/ dokumen)	10.254.668	1,285
18.	Pajak lokal atas kayu (Rp. 23.775.000/200 m <sup>3</sup> ; 4,44 kontainer per dokumen)	64.073.502	8,028
19.	Penerbitan SKSHH (surat keterangan sah hasil hutan), seri pertama	4.350.000	0,545

<sup>2</sup> Sumber: Tropical Forest Trust (terjemahan tidak resmi dari sebuah dokumen proyek dalam Bahasa Indonesia)

20.	Biaya pengangkutan ke Kendari	1.500.000	0,188
21.	Biaya truk kontainer	9.950.000	1,247
22.	Biaya uang saku supir truk FUSO	650.000	0,081
23.	Biaya IPKTM*	22.660.000	2,839
24.	Biaya RPBI*	5.811.255	0,728
25.	Insentif untuk penilai mutu kayu	210.000	0,026
26.	Biaya uang saku supir truk FUSO	550.000	0,069
27.	Pengangkutan kayu dari Joshua ke Nurdin (nama orang)	250.000	0,031
28.	Biaya SIUP*	853.000	0,107
29.	Komisi industri	1.150.000	0,144
30.	Uang muka untuk pengawalan Polda (police daerah tingkat provinsi)	8.406.521	1,053
	<b>Subtotal B</b>	<b>355.083.004</b>	<b>44,492</b>

No. Item	Kegiatan	Biaya	
		(Rp)	(%)
C.	Biaya administratif		
1.	Sewa kantor	5.400.000	0,677
2.	Peralatan kantor dan foto copy	5.214.650	0,653
3.	Materi untuk anggota baru dan pelatihan KU	3.048.700	0,382
4.	Biaya untuk surat keterangan sah hasil hutan (pada awal proses)	2.536.500	0,318
5.	Komisi penilai mutu kayu	3.150.000	0,395
6.	Biaya transportasi dan konsumsi karyawan di tempat penggergajian	5.257.609	0,659
7.	Biaya pengurusan LHP (transportasi, konsumsi dan foto copy)	1.101.172	0,138
8.	Biaya pengantaran dokumen pajak	0	0
9.	Biaya operasional bendahara	2.223.500	0,279
10.	Gaji kepala koperasi	700.000	0,088
11.	Biaya telepon/komunikasi untuk ...	1.169.321	0,147
12.	Gaji staf bagian inventori dan komputer	6.200.000	0,777
13.	Biaya benih dan pembibitan	7.395.849	0,927
14.	Transportasi ke Kendari dan lain-lain	6.919.718	0,867
15.	Pertemuan koperasi tahunan	6.573.367	0,824
16.	Membeli sepeda motor	3.000.000	0,376
17.	Membeli komputer laptop	3.000.000	0,367
18.	Biaya air dan listrik kantor	210.715	0,026
19.	Biaya transportasi dan konsumsi bagi tim inventori	2.809.000	0,352
20.	Biaya lain-lain	4.494.900	0,563
21.	Biaya pengepakan	0	0
22.	Insentif staf bagian inventori dan komputer	400.000	0,050
23.	Biaya operasional pemanenan kayu	270.800	0,034
24.	Sumbangan ke koperasi	500.000	0,063
25.	Tidak jelas*	20.000.000	2,506
26.	Biaya FSC	100.100	0,013
27.	Pinjaman bagi staf koperasi	400.000	0,050

28.	Pembayaran kredit ke Musram dan sumbangan	700.000	0,088
	Subtotal C	92.775.900	11.625
	Total biaya per kontainer (Subtotal A+ B + C)	798.091.012	100.000

	Penjualan kayu	1.031.932.400
	Laba kotor 2	232.841.388
	Dana bergulir (20%)	45.568.278
	Laba kotor 3	186.273.111
	Komisi manajemen koperasi (40%)	18.627.311
	Biaya KU (10%)	74.509.244
	Laba sebelum pajak	93.136.555
	Pajak penghasilan(1.5%)	1.397.048
	Total laba	91.739.507
	SHU (30%)	27.521.852
	Manajemen koperasi(10%)	9.173.951
	Simpanan untuk modal usaha bulan depan (60%)	55.043.704

\* Rincian tidak tersedia

Item dengan huruf miring adalah biaya-biaya tidak resmi.

Jumlah keseluruhan kayu yang terjual adalah 277.8187 m<sup>3</sup>, ekuivalen dengan 12 kontainer.